

**ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Miftahul Hairatul Jannah

Nim : 18313161

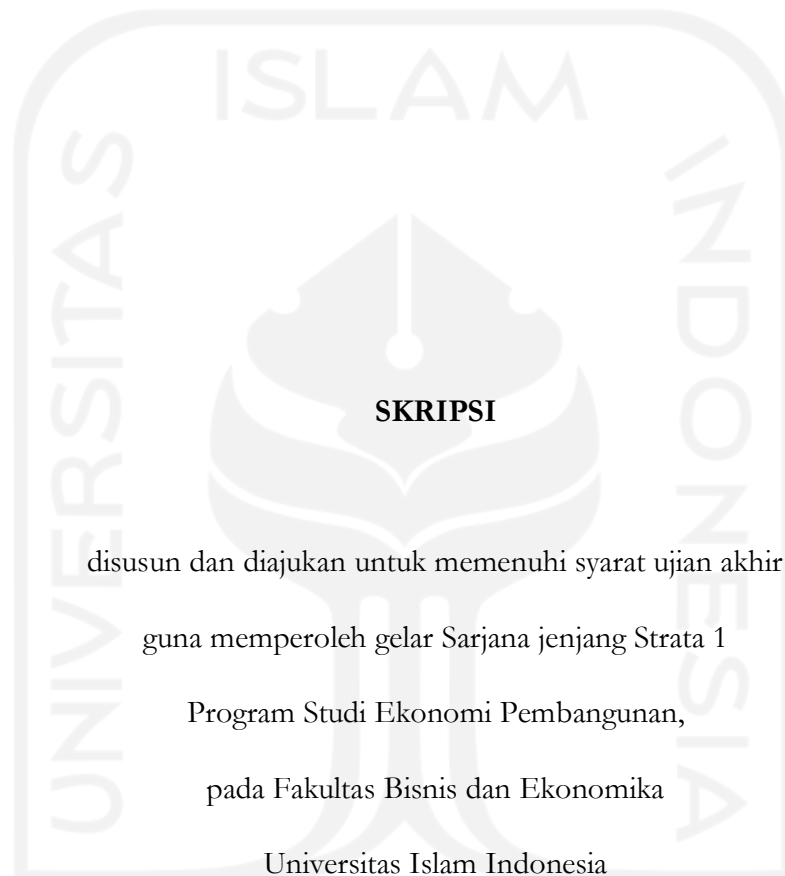
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2022



**ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016-2020**



Nama : Miftahul Hairatul Jannah

Nomor Mahasiswa : 18313161

Program Studi : Ekonomi Pembangunan



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2022

الجامعة الإسلامية
الاستدراكية

PERNYATAAN BEBAS PAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UIL. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Januari 2022

ulis,

Miftahul Hairatul Jannah

PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2016-2020

Nama : Miftahul Hairatul Jannah

Nomor Mahasiswa : 18313161

Program Studi : Ekonomi Pembangunan



Yogyakarta, 31 Januari 2022

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anang', is written over a faint circular stamp.

Unggul Priyadi, Dr., M.Si



PENGESAHAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2016-2020

Disusun Oleh : MIFTAHUL HAIRATUL JANNAH

Nomor Mahasiswa : 18313161

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada hari, tanggal: **Jumat, 11 Maret 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Unggul Priyadi, Dr., M.Si.

Penguji : Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati, S.E., M.E.K.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

“...Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al-Baqarah: 216)

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them”

(Walt Disney)

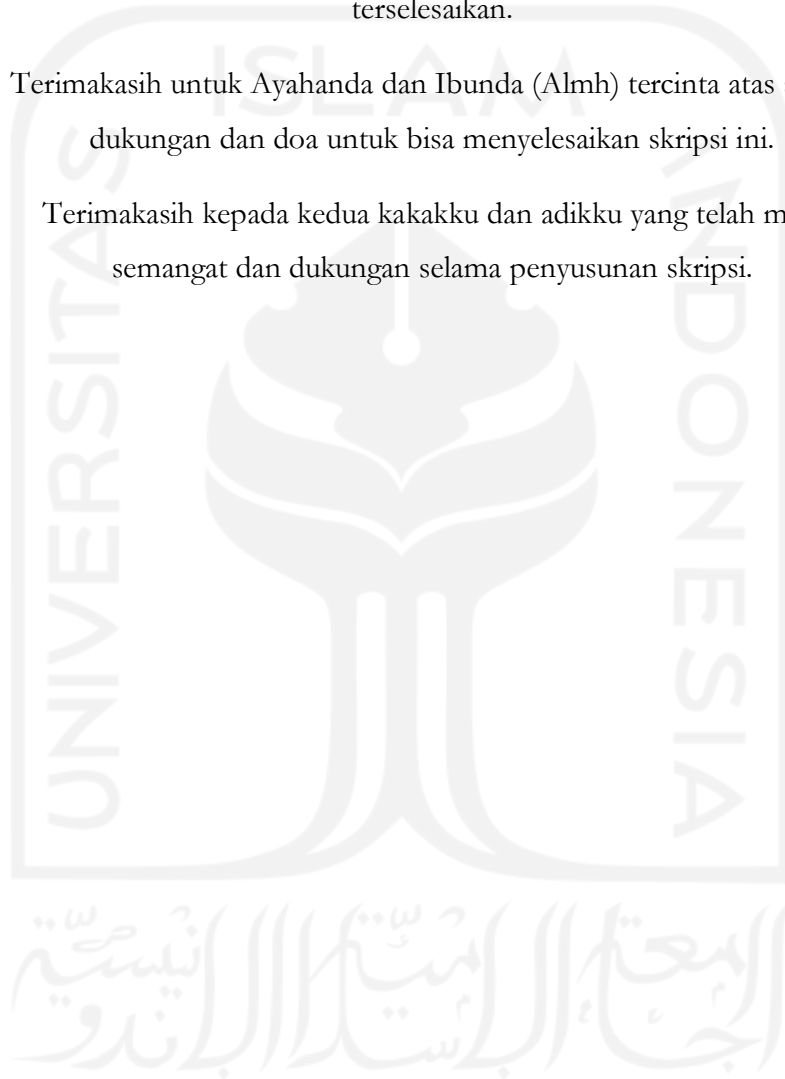
الجامعة الإسلامية
الاستدراكية

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamiin atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah swt dan atas segala kemudahan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih untuk Ayahanda dan Ibunda (Almh) tercinta atas segala bentuk dukungan dan doa untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada kedua kakakku dan adikku yang telah memberikan semangat dan dukungan selama penyusunan skripsi.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatub

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini secara tepat waktu. Tidak lupa pula Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena dengan syafaatnya telah membawa manusia kejalan yang benar.

Penulisan skripsi ini dilakukan guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini berjudul **“Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020”**.

Penulis dalam hal ini sadar atas segala bentuk kekurangan dan menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masih diperlukan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Dalam hal ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah swt atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan kesehatan, kemudahan dan kekuatan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
2. Ayahanda tercinta H.Taufiqurrahman yang selalu memberikan dukungan baik dalam segi moril dan materil demi kesuksesan anaknya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Ibunda tercinta Hj.Siti Zuhulaifah (Almh) yang semasa hidupnya selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis bisa menyelesaikan kuliah jenjang Strata 1 ini dengan tepat waktu.
4. Kedua kakakku dan adikku tercinta Saepudin Mahfuz S.T, Rayahin S.Pdi dan Zainul Fiqri Yatul Ihsan yang selalu memberikan semangat untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Unggul Priyadi, Dr., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi, yang selama masa bimbingan sudah meluangkan baik waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. selaku dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Bapak Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, SE. M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Ekonomi.
7. Ibu Dra. Ari Rudatin selaku dosen pembimbing akademik dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang dengan sabar telah memberikan pengajaran selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Teman teman seperjuangan Siti Cameliya, Fitri Awal Pasholihah, Diah Ayu Anzari, Eni Rakhmawati, Tiari Aristi Noviari, Widjiarti Nur Riswandi, Shinta Puspita Sari terimakasih sudah support selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. *Last but not least, i wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis dalam hal ini berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat kepada semua pihak dan menyadari masih terdapat banyaknya kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatub.

Yogyakarta, 31 Januari 2022

Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN UJIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Kajian Pustaka.....	14
2.2 Landasan Teori.....	21
2.2.1 Ketimpangan Pembangunan.....	21
2.2.3 Konsep Pertumbuhan Ekonomi.....	23
2.2.4 Konsep Kemiskinan.....	25
2.2.5 Konsep Tingkat Pengangguran Terbuka.....	26
2.2.6 Konsep Indeks Pembangunan Manusia.....	27
2.2.7 Konsep Pendapatan Asli Daerah.....	30
2.2.8 Konsep Dana Alokasi Umum.....	31
2.3 Pengaruh Antara Variabel Independen dengan Dependen.....	32
2.3.1 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi.....	32

2.3.2	Hubungan antara Jumlah Penduduk Miskin dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi	33
2.3.3	Hubungan Antara TPT dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi	33
2.3.4	Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Ketimpangan	34
2.3.5	Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dengan Ketimpangan	34
2.3.6	Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi	35
2.4	Kerangka Pemikiran	36
2.5	Hipotesis.....	38
BAB III		39
Metode Penelitian		39
3.1	Jenis dan Sumber Data.....	39
3.2	Variabel Operasional	39
3.2.1	Variabel Dependen	39
3.3	Metode Analisis	42
3.3.1	Indeks Williamson	42
3.3.2	Estimasi Regresi Data Panel.....	43
3.4	Pemilihan Model Terbaik.....	44
3.4.1	Uji Chow Test	44
3.4.2	Uji Hausman Test.....	45
3.5	Evaluasi Hasil Regresi	45
3.5.1	Uji T-Statistik.....	45
3.5.2	Uji F	46
3.5.3	Koefisien Determinasi (R^2) / R-Squared.....	46
BAB IV		47
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN		47
4.1	Analisis Deskriptif	47
Gambar 4.1 Ketimpangan Pembangunan Ekonomi.....		49
4.2	Pemilihan Model Regresi	49
4.3	Analisis Model Regresi Terpilih (Random Effect)	54
4.3.1	Uji t	56
4.3.2	Uji F	58

4.3.3	Koefisien Determinasi (R^2).....	60
4.4	Pembahasan	60
4.4.1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi.....	60
4.4.2	Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi	61
4.4.3	Pengaruh TPT terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi.....	62
4.4.4	Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi.....	63
4.4.5	Pengaruh PAD terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi.....	64
4.4.6	Pengaruh DAU terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi	65
BAB V	67
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI	67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Implikasi.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Pustaka	17
Tabel 2.2 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP	27
Tabel 4.1 Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	41
Tabel 4.2 Hasil Estimasi Metode Common Effect	43
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Metode Fixed Effect	44
Tabel 4.4 Hasil Estimasi Metode Random Effect	45
Tabel 4.4 Uji Chow	46
Tabel 4.5 Uji Hausman	46
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Regresi Random Effect.....	47
Tabel 4.7 Hasil Uji F	49
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi R^2	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	3
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin	4
Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	5
Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia.....	7
Gambar 1.5 Pendapatan Asli Daerah	8
Gambar 1.6 Dana Alokasi Umum	9
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1 Ketimpangan Pembangunan Ekonomi.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	63
Lampiran 2 Indeks Williamson.....	65



ABSTRAK

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi harus saling berkesinambungan karena pada dasarnya kedua aspek penting tersebut haruslah saling berkaitan sebagai tujuannya untuk menciptakan daerah atau wilayah yang merata dari segi pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020. Adapun dalam hal ini faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dengan menggunakan pendekatan random effect. Hasil penelitiannya menunjukkan dimana variabel TPT tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan PAD berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi dan variabel jumlah penduduk miskin, IPM dan DAU berpengaruh secara positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020.

Kata Kunci : *Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Badan Pusat Statistik dimana Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa dengan jumlah provinsi 34 yang tersebar diberbagai pulau dengan berbagai bentuk perbedaan baik dari segi kualitas sumberdaya dan kondisi demografi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat didunia dengan jumlah penduduk hingga tahun 2020 sebanyak 270.70 juta jiwa.

Kondisi perekonomian Indonesia hingga saat ini masih terbilang cenderung stabil dan mengalami peningkatan, akan tetapi hal ini tidak diiringi dengan upaya pemerataan yang dilakukan pemerintah. Sehingga masih banyak terjadinya ketimpangan pada suatu daerah diberbagai Provinsi. Padahal terjadinya suatu pertumbuhan ekonomi sudah seharusnya diikuti dengan adanya pemerataan pembangunan ekonomi yang pada suatu daerah (Ningrum, 2018).

Menurut Bank Indonesia kondisi perekonomian khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun ketahun memiliki perekonomian yang terus bergerak kearah positif akan tetapi hal tersebut juga tidak lepas dari adanya ketimpangan dalam suatu pembangunan, hal tersebut dicerminkan melalui kondisi pertumbuhan ekonomi tiap Kabupaten/Kota masih belum merata.

Pembangunan adalah suatu kenyataan fisik dan tekad terhadap suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional untuk mencapai kehidupan yang jauh lebih baik. Pembangunan ekonomi merupakan suatu permasalahan yang cukup penting pada suatu negara, dimana pembangunan tersebut merupakan suatu proses multidimensional yang didalamnya terdapat berbagai perubahan dalam struktur nasional (Todaro & Smith, 2015).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu bentuk proses yang menyebabkan terjadinya kenaikan terhadap pendapatan riil suatu daerah dalam kurun waktu jangka panjang dan disertai dengan perbaikan yang terjadi pada sistem kelembagaannya . Dalam hal ini dimana timbulnya perubahan dari segi perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat, dapat dikatakan menjadi awal perbaikan dalam perekonomian. Dalam hal ini yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi adalah terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin menurunnya tingkat ketimpangan antara daerah satu dengan lainnya.

Pembangunan ekonomi tersebut tidak hanya tugas dari pemerintah pusat atau tugas suatu negara akan tetapi pembangunan ekonomi tersebut merupakan tugas bersama baik dari suatu daerah maupun lingkup nasional. Ketimpangan antar daerah merupakan suatu bentuk permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari proses perubahan yang terjadi akibat terjadinya pembangunan.

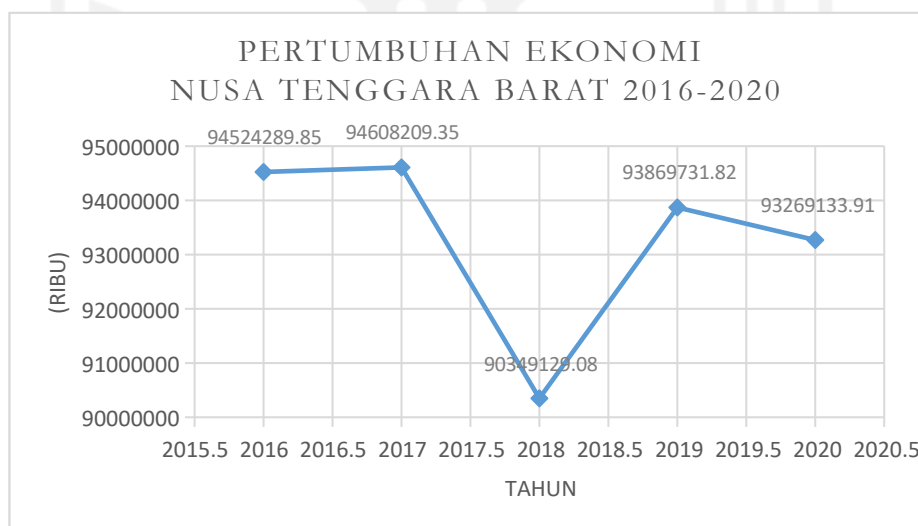
Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan suatu proses yang terjadi dalam suatu pembangunan. Dimana terjadinya ketimpangan tersebut tidak bisa dipungkiri akibat adanya perbedaan dari segi demografi suatu daerah. Dimana adanya perbedaan tersebut juga berpengaruh terhadap kemampuan suatu daerah dalam mengolah potensi yang ada sebagai upaya dalam meningkatkan pembangunan, sehingga tidak dapat dipungkiri akan berpengaruh pada suatu daerah dimana ada daerah tertinggal dan terdapat adanya daerah maju (Ginting, 2015).

Menjelaskan bahwa ketimpangan antar daerah yang terjadi selalu berakibat pada permasalahan yang berujung besar pada suatu daerah. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat (Lestari, 2017). Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan beberapa hal misalnya kurangnya sumber-sumber daya yang dimiliki, adanya kecenderungan penanam modal memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, juga tenaga kerja yang terampil. Disamping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat

kepada daerah juga dapat menyebabkan perbedaan kemajuan (pertumbuhan ekonomi) antar daerah.

Ketimpangan pembangunan ekonomi tersebut tentu tidak dapat dipungkiri akan memiliki pengaruh besar terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung mencerminkan segala bentuk kegiatan ekonomi, baik itu positif maupun negative. Dimana jika pertumbuhan ekonomi tersebut positif, dimana tentu distribusi pada suatu daerah tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi sebaliknya, jika negatif maka tentu sudah bisa dipastikan bahwa terjadinya distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga berdampak pada penurunan pada sisi pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan tersebut dapat dilihat dengan menggunakan indeks ketimpangan williamson, dimana indeks ini digunakan dalam memberikan gambaran terkait kondisi pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tersebut.



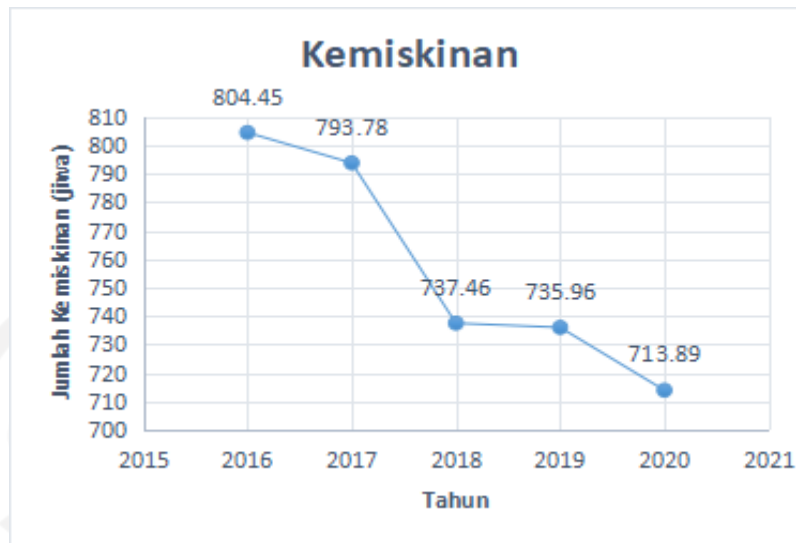
Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota NTB

Sumber: BPS Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan dari segi pertumbuhan ekonomi hal ini terlihat dari data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, akan tetapi dalam hal ini pada tahun 2018 terlihat cukup berfluktuatif tercatat bahwa terjadi penurunan. Hal tersebut dikarenakan karena terjadinya bencana yang melanda sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya pulau Lombok, sehingga hal ini menjadi faktor utama penyebab turunnya perekonomian. Tercatat beberapa sektor diantaranya mengalami penurunan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, seperti halnya dari segi sektor pariwisata. Dalam hal ini jumlah wisatawan cenderung mengalami penurunan yang menyebabkan hal tersebut berdampak terhadap penerimaan daerah dari segi sektor pariwisata dimana banyak hotel mengalami penurunan pendapatan. Akan tetapi hal tersebut mulai mengalami pemulihan dengan dibuktikan dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 dengan angka Rp 93.869.731,82.

Tidak hanya itu, dalam hal ini yang menjadi faktor penting dalam suatu pembangunan agar berjalan dengan baik yang memungkinkan terjadinya penurunan tingkat ketimpangan adalah dengan adanya desentralisasi, dimana dalam hal ini desentralisasi merupakan suatu alat yang di gunakan sebagai alat untuk pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan daerah. Dimana dengan adanya pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah tersebut dimungkinkan akan terjadinya pembangunan yang jauh lebih baik. Karena pada hakikatnya suatu pembangunan ekonomi pada daerah tersebut merupakan suatu kegiatan dimana pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat, baik dalam hal hal mengelola maupun dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki sebagai salah satu upaya dalam mendorong terjadinya kenaikan taraf hidup suatu masyarakat. Akan tetapi dalam hal ini adanya desentralisasi tersebut menyebabkan timbulnya angka penduduk miskin akibat tidak meratanya pembangunan antara suatu daerah.



Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin

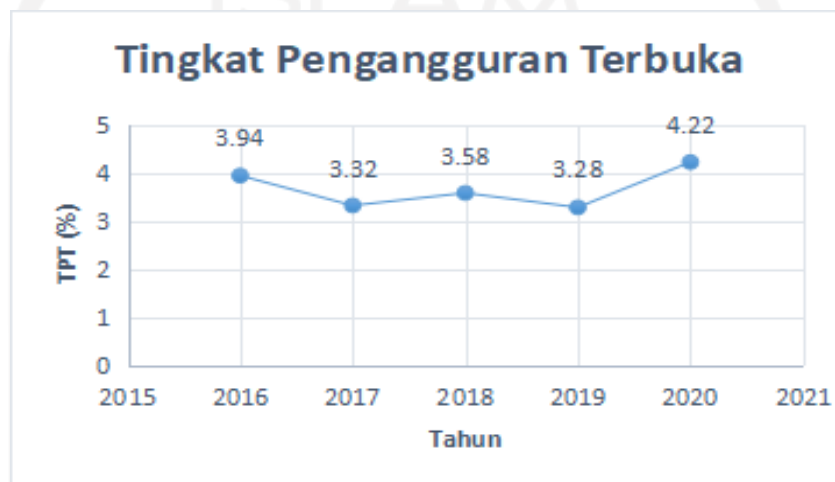
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun mengalami penurunan hal tersebut dibuktikan dengan angka pengangguran yang tercatat pada tahun 2016 sebanyak 804.45 jiwa. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2017 hingga tahun 2018 dimana angka kemiskinan turun dari 793.78 jiwa menjadi 737.46 jiwa. Hal tersebut merupakan angka penurunan yang cukup signifikan sedangkan diwaktu yang bersamaan seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2018 pulau Lombok sedang dilanda bencana gempa bumi. Terjadinya bencana tersebut tentu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian masyarakat. Akan tetapi hal tersebut justru berbanding terbalik dimana angka kemiskinan justru mengalami penurunan hal tersebut tentu bentuk keberhasilan dari berbagai program yang digalangkan pemerintah seperti halnya bantuan pangan non tunai (BNPT), beras sejahtera (Rastra) dan program keluarga harapan (PKH)

Penurunan juga terjadi pada tahun 2020 dimana angka penurunan tersebut menjadi kabar baik karena seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Provinsi kedua dengan penurunan angka kemiskinan tercepat. Hal ini tentu tidak bisa dipungkiri penurunan tersebut terjadi karena terus terjaganya nilai tukar petani (NTP) dengan angka 4,16 persen yang tentunya hal ini mengindikasikan

bahwa terdapat adanya keberhasilan dalam ekonomi masyarakat desa di Nusa Tenggara Barat yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani.

Disamping itu yang menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu ketimpangan yang tidak kalah pentingnya pada suatu daerah adalah karena adanya pengangguran, dimana hal ini menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan maupun penurunan ketimpangan suatu wilayah.



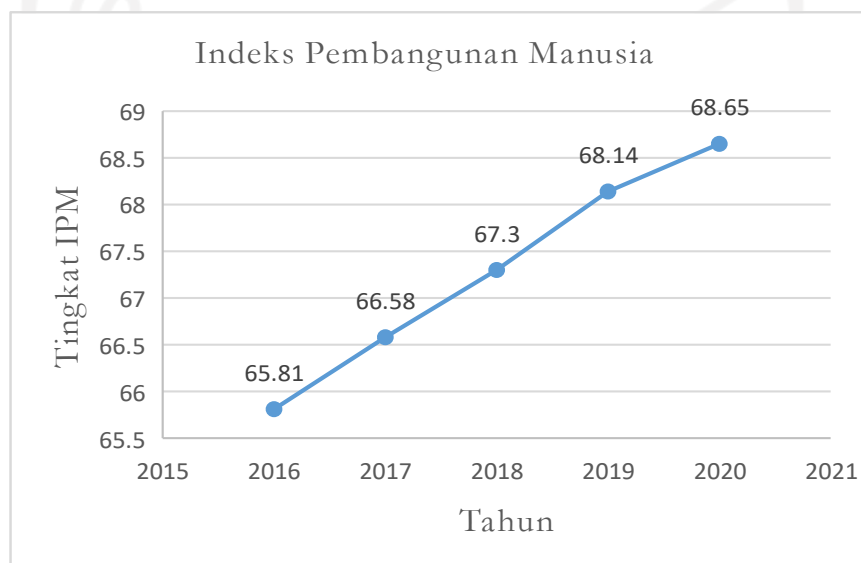
Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: BPS Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa tingkat pengangguran pada Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/kota pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Akan tetapi pada tahun 2020 tingkat pengangguran tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan angka 4.22 persen atau sebesar 0.94 persen dari tahun 2019, kenaikan ini disebabkan karena adanya pandemi covid 19 sehingga dalam hal ini banyak terjadinya pembatasan dalam aktivitas seseorang, pembatasan ini berakibat juga pada sektor perdagangan dan juga transportasi. Tidak hanya itu, adanya pandemi covid 19 menyebabkan sektor produksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada awal terjadinya pandemi memaksa seseorang untuk pintar dalam mengalokasikan keuangannya sehingga menurunnya permintaan seseorang pada berbagai kebutuhan. Begitupula dalam sektor pariwisata, karena adanya pandemic tersebut mengakibatkan pengurangan wisatawan yang datang untuk berlibur,

sehingga hal ini berdampak kepada para pekerja dibidang pariwisata yang banyak kehilangan pekerjaannya.

Selanjutnya yang menjadi faktor terpenting dalam mengukur tingkat ketimpangan pada suatu daerah adalah dengan melihat bagaimana kualitas manusia suatu daerah tersebut dengan melalui indeks pembangunan manusia yang didasarkan pada 3 komponen, diantaranya yaitu angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan tingkat kehidupan yang layak.



Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia

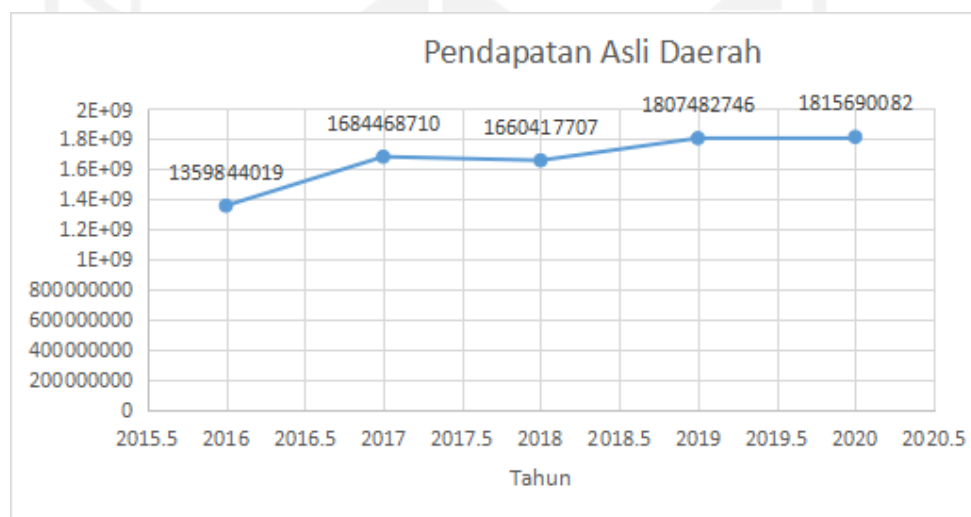
Sumber: BPS Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa, kualitas indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada rentang waktu dari tahun 2016-2020 dari tahun ketahun mengalami kenaikan.. Hal ini ditunjukkan dengan angka 65.81 persen pada tahun 2016 lalu meningkat hingga mencapai angka 68.65 persen ditahun 2020. Hal tersebut mencerminkan secara garis besar bahwa kualitas penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah cukup baik walaupun angka tersebut masih tergolong dalam capaian kategori sedang.

Pada kurn waktu tahun 2016-2020 angka kenaikan paling rendah terjadi pada tahun 2020, hal tersebut terlihat bahwa kenaikan dari tahun 2019 hahnya 0.51 persen. Padahal indeks pembangunan manusia ini merupakan salah satu alat ukur

yang digunakan dalam mengukur sejauh mana keberhasilan target pembangunan yang telah dijalankan pemerintah. Penurunan tersebut tentu tidak bisa dipungkiri penyebab utamanya adalah karena terjadinya pandemic covid 19 yang berakibat pada penurunan pada indikator pengeluaran per kapita, sehingga hal tersebut menjadi penyebab turunnya angka IPM.

Tidak kalah pentingnya dalam mengukur ketimpangan pada suatu daerah juga harus melihat dari sisi pendapatan suatu daerah tersebut karena pada dasarnya jumlah penerimaan suatu daerah tersebut akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya ketimpangan pada suatu daerah tersebut.



Gamabar 1.5 Pendapatan Asli Daerah

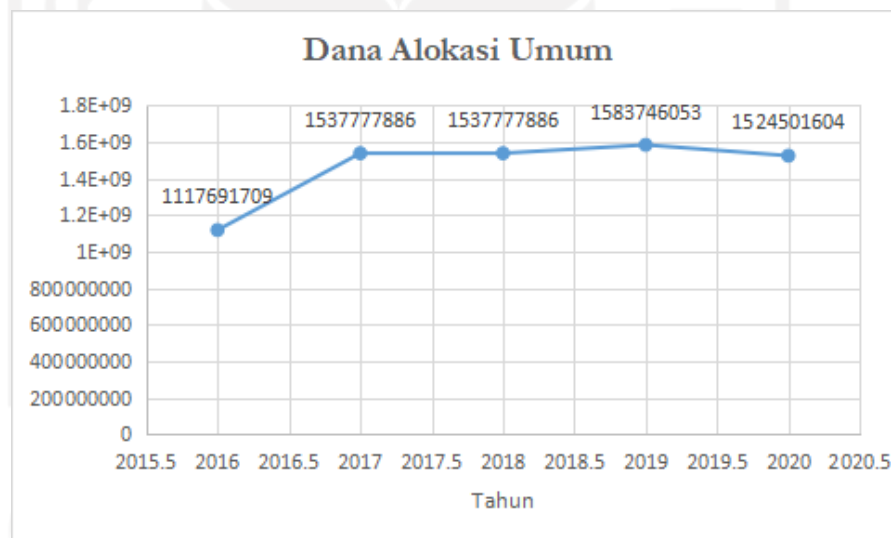
Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan grafik di atas, pendapatan asli daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat jika dilihat secara keseluruhan masih mengalami fluktuatif. Seperti dalam grafik tersebut terlihat bahwa dari tahun ketahun seperti halnya dari tahun 2016-2020 dimana kenaikan dan penurunan tersebut tidak terjadi secara signifikan. Realisasi PAD pada tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan terjadinya bencana gempa bumi yang menyebabkan runtuhnya perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam hal ini juga tercatat bahwa pada tahun 2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut cenderung mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun

2019, padahal pada tahun 2020 keadaan perekonomian sedang dalam kondisi yang kurang stabil dikarenakan terjadinya pandemic covid 19. Akan tetapi kondisi ini tidak menjadi alasan masyarakat untuk tidak membayar pajak, karena hal ini tercermin pada masyarakat Nusa Tenggara Barat yang tetap melakukan wajib pajak. Hal tersebut tercatat bahwa salah satu indikator capaian PAD mengalami peningkatan dari sisi kewajiban dalam Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, adanya pajak tersebut memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah pada kondisi pandemi covid 19.

Aspek yang tidak kalah pentingnya adalah dana alokasi umum, seperti yang kita ketahui bahwa dalam suatu daerah salah satu tujuan dianggarkannya dana alokasi umum tersebut adalah dengan tujuan untuk melakukan pemerataan terkait kekurangan dalam hal keuangan suatu daerah dalam pemenuhan kebutuhannya.



Gambar 1.6 Dana Alokasi Umum

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan grafik tersebut dari tahun ketahun khususnya pada periode 2016-2020 serapan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengalami peningkatan. Akan tetapi angka realisasi anggaran tersebut cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020, hal ini dikarenakan alokasi anggaran yang di

terima pemerintah Provinsi mengalami penurunan akibat adanya pandemi, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap postur APBD dan hal ini juga dipengaruhi karena dalam pelaksanaan realisasi anggaran tersebut belum dilakukan secara maksimal. Sehingga hal ini tercermin dari meningkatnya angka kematian akibat pandemi covid 19 yang dimana anggaran tersebut sudah dialokasikan untuk membantu dalam upaya penanggulangan covid, namun belum mampu direalisasikan dengan baik.

Berdasarkan berbagai bahasan yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan tersebut seperti halnya jika dilihat masih terdapat adanya permasalahan dari segi kualitas kependudukan dan juga dari segi perekonomian. Pada dasarnya dalam hal ini dari sisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut masih cenderung fluktuatif hal tersebut terlihat dari data perolehan pada Badan Pusat Statistik dan begitupula dari sisi kependudukan dimana dalam hal ini masih terdapat adanya permasalahan dari sisi kemiskinan walaupun mengalami penurunan akan tetapi belum secara signifikan dan fluktuasi dari angka pengangguran yang cenderung masih naik turun.

Berdasarkan hal tersebut jika dilihat dari berbagai permasalahan tersebut maka akan dilakukan penelitian yang berjudul **ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016-2020.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh secara simultan tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah kemiskinan, jumlah pengangguran terbuka, IPM, PAD dan DAU terhadap ketimpangan pembangunan?
2. Bagaimana pengaruh secara parsial tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial jumlah kemiskinan terhadap ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat?

4. Bagaimana pengaruh secara parsial tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
5. Bagaimana pengaruh secara parsial tingkat IPM terhadap ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
6. Bagaimana pengaruh secara parsial tingkat PAD terhadap ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
7. Bagaimana pengaruh secara parsial tingkat DAU terhadap ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis secara simultan tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah kemiskinan, jumlah pengangguran terbuka, IPM, PAD dan DAU terhadap ketimpangan pembangunan
2. Untuk menganalisis secara parsial pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Untuk menganalisis secara parsial pengaruh jumlah kemiskinan terhadap ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Untuk menganalisis secara parsial pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Untuk menganalisis secara parsial pengaruh tingkat IPM terhadap ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Untuk menganalisis secara parsial pengaruh PAD terhadap ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Untuk menganalisis secara parsial pengaruh DAU terhadap ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pengambil kebijakan

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berbagai kebijakan yang tepat oleh pembuat kebijakan, terutama terkait

dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran teruka, indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat

2. Peneliti

Diharapkan dapat sebagai referensi bagi peneliti lain yang memiliki topik penelitian yang sejalan dengan penelitian ini sehingga dapat dikembangkan dan menjadi manfaat untuk orang banyak

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan menguraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga terkait sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka dan Landasan Teori

1. Kajian pustaka, dalam hal ini berisi terkait kajian terdahulu dengan topic yang sama yang bisa dijadikan rujukan dalam penulisan penelitian ini.
2. Landasan teori, berisi terkait teori yang dijadikan sebagai dasar dalam penelitian yang sedang dilakukan mengenai pemecahan masalah dan juga untuk melihat bagaimana hubungan antar variabel.
3. Kerangka pemikiran, berisi terkait ringkasan antara variabel dependen dari masalah yang diteliti dengan variabel independennya.
4. Hipotesis, berisi terkait rumusan sementara dari penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada penelitian terdahulu dan teori dasar.

Bab III Metode Analisis

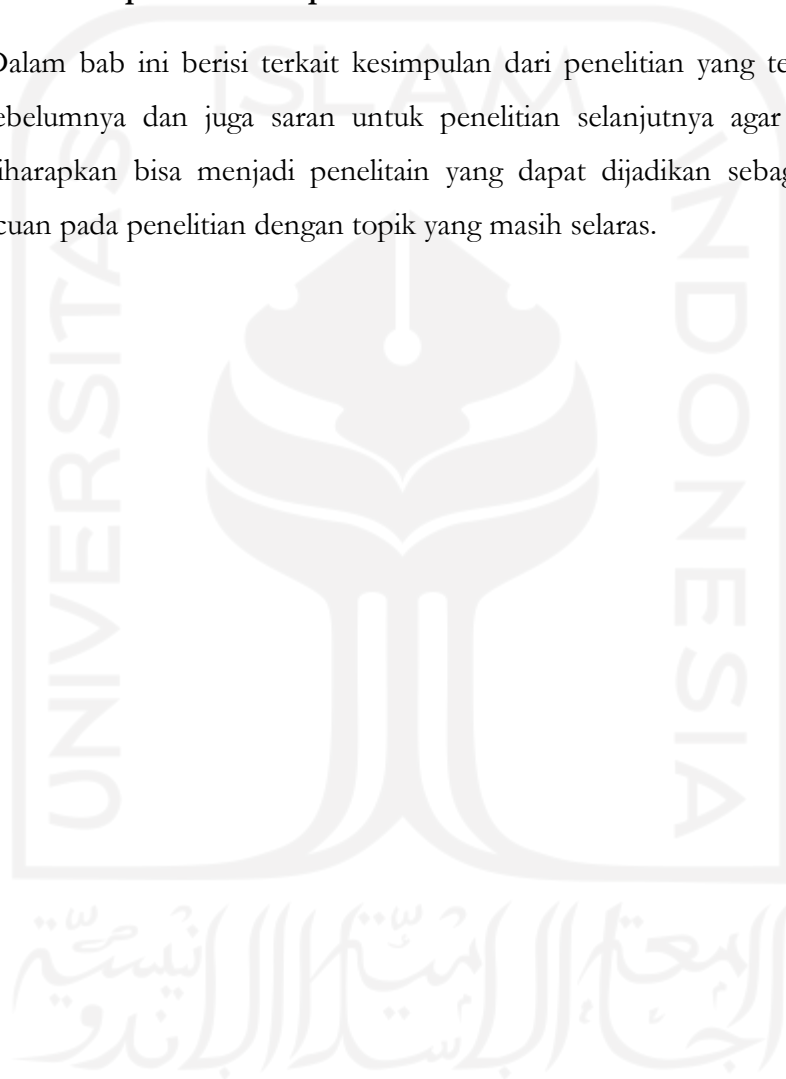
Pada bab ini berisi terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang akan menjelaskan bagaimana bentuk metode yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi terkait analisis dan pembahasan dari pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang diuraikan pada Bab III. Dan dalam hal ini pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hipotesis yang sebelumnya telah dijelaskan pada Bab II

Bab V Simpulan dan Implikasi

Dalam bab ini berisi terkait kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga saran untuk penelitian selanjutnya agar penelitian ini diharapkan bisa menjadi penelitan yang dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pada penelitian dengan topik yang masih selaras.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu bentuk referensi dari penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai suatu rujukan dalam penulisan skripsi ini dan dapat memperkuat hasil dari analisis tersebut serta untuk menghindari adanya plagiarisme pada penulisan skripsi ini. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti berkaitan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai kajian pustaka, di antaranya :

Faiz (2011) menyebutkan dalam penelitian tentang Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, tingkat Pengangguran dan Panjang Jalan Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Menurut Tipologi Klassen Pada 25 kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008. Dimana dalam penelitian tersebut penulis dalam hal ini menggunakan variabel Pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, tingkat pengangguran dan panjang jalan. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis data panel dengan fixed effect model. Dan dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa dengan periode tahun 2004-2008 variabel independen yang digunakan dalam penelitian seperti halnya

pertumbuhan, aglomerasi, tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang positif terhadap ketimpangan wilayah tersebut, kecuali variabel panjang jalan dimana dalam penelitian yang dilakukan bahwa variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan dalam suatu wilayah.

Dewi et al. (2011) menjelaskan dalam penelitian tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dimana dalam hal ini penulis menggunakan variabel independennya berupa PDRB dan jumlah penduduk. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan alat analisis berupa analisis Tipologi Klassen, indeks williamson, dan regresi non linier. Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah yaitu dalam struktur pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Bali dilakukan pembagian kedalam 3 pola, diantaranya: Daerah yang maju yang disertai dengan pertumbuhan yang relatif cepat, seperti Kabupaten badung, daerah dengan pola perkembangan yang cepat akan tetapi dibawah tekanan yaitu Kabupaten Gianyar, Buleleng dan Kota Denpasar, yang terakhir adalah daerah dengan pola tertinggal adalah kabupaten Jembrana, Tabanan, Karagasem dan Bangli. Dan diperoleh bahwa ketimpangan di Provinsi Bali erdasarkan perhitungan dengan indeks williamson adalah bahwa tingkat ketimpangannya berada pada nilai 0,68 atau bisa dikatakan berada pada kategori yang tinggi.

Mopangga (2011) menjelaskan dalam penelitian tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. Dimana penulis dalam hal ini menggunakan variabel independennya berupa PDRB perkapita, Indeks Pembangunan manusia dan rasio pengeluaran infrastruktur. Dalam hal ini alat analisi yang digunakan antara lain adalah indeks williamson, rasio gini, Shift share, Tipologi klassen dan Regresi panel tidak seimbang. Dimana hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun dalam hal ini terjadinya suatu pertumbuhan yang relatif masih rendah dari sektor non pertanian, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian tersebut tetap memiliki peranan yang cukup signifikan dalam perekonomian. Pada kurun waktu 2001-2008 di provinsi Gorontalo terjadi pertumbuhan ekonomi pada sektor sekunder dan tersier, yang terdiri dari

pada kuadran I tipologi matriks kelas, Kabupaten Pohuwoto dan Kota Gorontalo memiliki perekonomian yang cukup kompetitif. Di kuadran III terdapat Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango. Dimana jika dilihat secara parsial variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap terjadinya ketimpangan.

Dhyatmika & Atmanti (2013) menjelaskan dalam penelitian ini tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran. Dimana penulis dalam hal ini dimana penulis menggunakan variabel independen diantaranya penanaman modal asing (PMA), pengeluaran pemerintah (GE) dan tingkat pengangguran (UE). Dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan indeks Williamson, tipologi kelas dan analisis data panel dengan fixed effect model. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pada Provinsi Banten yang didasarkan pada tipologi kelas, dimana kelompok daerah maju yang disertai dengan perkembangan yang cepat di duduki Kota Tangerang dan Cilegon. dan kategori daerah berkembang di antaranya adalah Kabupaten Tangerang dan yang terakhir yaitu selain yang termasuk kedalam 2 kategori tersebut termasuk daerah tertinggal. Disamping itu variabel independen penanaman modal asing memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat ketimpangan pada Provinsi Banten.

Nurhuda et al. (2013) menjelaskan dalam penelitian ini tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Jawa Timur Tahun 2005-2011). Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel independen seperti PDRB, PAD, DAU dan IPM. Dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan indeks Williamson, hipotesis Kuznets dan regresi berganda. Dimana dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa berdasarkan perhitungan dengan menggunakan indeks Williamson nilai ketimpangan yang diperoleh tergolong rendah dengan angka mendekati 0. Untuk variabel PAD dan IPM berdasarkan hipotesis Kuznet ditemukan pengaruh negatif dengan ketimpangan pembangunan. Sedangkan untuk PDRB dan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pembangunan karena belum memenuhi syarat dalam pengujian asumsi klasik.

Harun & Maski (2013) menjelaskan dalam penelitian ini tentang Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). Dimana dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Dan dalam hal ini alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode indeks williamson dan metode analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan random effect model. Hasil yang didapatkan dari dilakukannya penelitian tersebut adalah dimana variabel dependen pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap variabel ketimpangan pembangunan wilayah.

Penelitian yang dilakukan Andhiani et al., (2018) tentang Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, investasi, belanja pemerintah, aglomerasi dan tenaga kerja. Untuk alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan alat analisis berupa metode deskriptif dan regresi data panel. Dan didapatkan hasil penelitian, dimana variabel independen pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan berbanding terbalik dengan angka ketimpangan yang berada ada angka IW 0.406-0.446. sedangkan variabel independen investasi, aglomerasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja memiliki pengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pembangunan.

Penelitian yang dilakukan Wicaksono (2017) tentang Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah penduduk miskin, PDRB Per Kapita, Pengeluaran pemerintah. Dan alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan indeks gini dan data panel. Sehingga dalam penelitian ini didapatkan hasil dimana variabel PDRB berpengaruh secara positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh secara negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatn.hal ini berbanding terbalik dimana variabel jumlah penduduk miskin justru tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pembangunan tersebut.

Penelitian yang dilakukan Autor (2018) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah 2010-2017. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah PDRB (ADHK), inflasi dan jumlah penduduk. Dan metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode regresi data panel. Sehingga didapatkan hasil bahwa variabel PDRB (ADHK) dan jumlah penduduk berpengaruh secara positif terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah, sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.



Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu secara ringkas disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kajian Pustaka

No	Keterangan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Asman Al Faiz (2011) tentang Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, tingkat Pengangguran dan Panjang Jalan Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Menurut Tipologi Klassen Pada 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2008.	Variabel independen pertumbuhan, aglomerasi, tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang positif terhadap ketimpangan wilayah tersebut, kecuali variabel panjang jalan.	Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis data panel dengan fixed effect model.	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah aglomerasi, tingkat pengangguran dan panjang jalan.
2	Ida Ayu Indah Utami Dewi, Made Kembar Sri Budhi dan Wayan Sudirman (2014) tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.	Berdasarkan indeks williamson tingkat ketimpangan Bali berada pada nilai 0,68.	Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis berupa indeks Williamson	Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah berupa tipologi kelas regresi non linear
3	Herwin Mopangga (2011) tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo.	Pada 2001-2008 di provinsi Gorontalo terjadi pertumbuhan ekonomi pada sektor sekunder dan tersier, yang terdiri dari pada kuadran I dan kuadran III.	Variabel yang digunakan IPM dan menggunakan alat analisis yang sama yaitu indeks williamson.	Dalam hal ini alat analisis yang digunakan antara lain adalah rasio gini, Shift share, Tipologi kelas dan Regresi panel tidak seimbang.
4	Ketut Wahyu Dhyatmika (2013) tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi banten Pasca	Semua variabel berpengaruh kecuali variabel pengeluaran	Menggunakan variabel yang sama berupa tingkat pengangguran	Alat analisis berupa tipologi kelas dengan variabel

	Pemekaran.	pemerintah dan tingkat pengangguran tidak	dan alat analisis berupa regresi data panel	independen lainnya berupa penanaman modal asing dan PE.
5	Rama Nurhuda, M R Khairul Muluk dan Wima Yudo Prasetyo tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Jawa Timur Tahun 2005-2011).	Nilai ketimpangan tergolong rendah dengan angka mendekati 0. Untuk variabel PAD dan IPM berpengaruh negatif sedangkan PDRB dan DAU tidak berpengaruh.	Menggunakan variabel yang sama yaitu DAU, PAD dan IPM dan alat analisis berupa indeks williamson.	Menggunakan alat analisis berupa hipotesis kuznet, regresi berganda
6	Lukman Harun dan Ghozali Maski. Tentang Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur).	Variabel dependen pengeluaran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap variabel ketimpangan pembangunan wilayah.	Menggunakan variabel yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan alat analisis berupa regresi data panwl	Menggunkan variabel independen berupa pengeluaran pemerintah.
7	Kartika Dorcas Andhiani, Erfit dan Adi Bhakti (2018) tentang Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera	Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan berbanding terbalik dengan angka ketimpangan sebesar IW 0.406-0.446.	Menggunakan variabel independen yang sama berupa pertumbuhan ekonomi dan alat analisis berupa regresi data panel.	Alat analisi berupa metode deskriptif dan menggunakan variabel independen investasi, aglomerasi dan tenaga kerja.
8	Dedy Tulus Wicaksono (2018) tentang Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015	Variabel PDRB, pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan, kecuali jumlah penduduk miskin tidak berengaruh.	Dalam penelitian ini variabel yang digunakan sama yaitu dan jumlah penduduk miskin	Alat analisis yang digunakan adalah berupa indeks gini dan menggunakan variabel pengeluaran pemerintah

9	Naelul Autor (2018) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah (2010-2017)	Variabel PDRB dan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap ketimpangan sedangkan inflasi tidak berpengaruh	Dalam penelitian ini alat analisi yang digunakan adalah data panel	Meggunakan variabel yang berbeda yaitu inflasi dan jumlah penduduk
---	--	--	--	--

Berdasarkan kajian pustaka di atas, penelitian ini merujuk terhadap penelitian ini terdapat adanya hubungan antar variabel yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan. Variabel dependen yaitu ketimpangan pembangunan ekonomi dan variabel independen adalah PDRB per Kapita, DAU, IPM dan PAD. Penelitian tersebut dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2005-2011 dan data tersebut adalah data panel (Nurhuda et al., 2013).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ketimpangan Pembangunan

Ketimpangan pembangunan ekonomi regional adalah suatu jenis aspek dimana hal tersebut sangat mungkin terjadi dalam suatu kegiatan perekonomian yang ada dalam suatu ruang lingkup daerah. Dimana terjadinya ketimpangan tersebut disebabkan karena terdapat adanya perbedaan dari segi potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, baik dari segi sumberdaya alam maupun dari segi demografi suatu daerah. Sehingga hal ini menjadi penyebab awal terdapat adanya daerah maju dan terbelakang, karena adanya perbedaan kemampuan suatu daerah dalam mengelola potensi yang dimilikinya.

Syafrizal dalam jurnal Faiz (2015) menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan yang terjadi antar wilayah yaitu:

1. Perbedaan kondisi demografis

Dalam hal ini perbedaan pada kondisi demografis tersebut diantaranya perbedaan pada tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan pada tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi pada sistem tenaga kerja dan perbedaan pada perilaku tenaga kerja yang berlaku pada suatu wilayah tersebut.

Dimana hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pada suatu masyarakat, dimana jika kondisi demografis pada suatu wilayah tersebut baik maka akan berdampak baik terhadap perekonomian suatu masyarakat yang dicerminkan dengan terciptanya berbagai lapangan kerja bagi suatu masyarakat.

2. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Dalam hal ini faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan adalah karena adanya perbedaan pada kandungan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Dimana suatu daerah dalam sistem perekonomian dengan tingkat pertumbuhan yang relatif cepat tentunya didukung dengan terpenuhinya penyediaan sumberdaya alam, sehingga dalam kegiatan produksi yang dilakukan bisa menghasilkan berbagai macam produk yang tentunya dengan biaya yang bisa terbilang relatif lebih murah dibandingkan dengan daerah dengan sumberdaya alam yang relatif belum terpenuhi sehingga berakibat terhadap pelambatan terhadap laju pertumbuhan pada daerah tersebut.

3. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Suatu wilayah dengan konsentrasi ekonomi cukup besar, tentunya akan berdampak pada percepatan terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah tersebut. Sehingga dengan adanya konsentrasi pada kegiatan ekonomi suatu wilayah secara tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan terkait penyediaan tingkat lapangan pekerjaan sehingga hal ini akan berdampak pada peningkatan pembangunan yang terjadi pada suatu wilayah.

4. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Alokasi dana yang ditetapkan pada sistem pemerintahan tentu akan pro terhadap daerah. Dimana dengan adanya alokasi dana yang relatif besar tersebut dimungkinkan akan terjadinya pembangunan pada suatu wilayah, sehingga akan berdampak pada pengurangan tingkat ketimpangan yang terjadi antara wilayah satu dengan lainnya.

5. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Terjadinya proses mobilitas barang dan jasa yang terjadi pada suatu daerah dalam hal ini tentu akan berdampak pada suatu sistem transaksi atau perdagangan yang dilakukan antar suatu daerah. Dimana dalam hal ini pada suatu wilayah yang membutuhkan seperti halnya pedesaan tentu akan kesulitan dalam memenuhi beberapa kebutuhannya yang tidak bisa dipenuhi oleh daerah tempat tinggalnya. Maka secara tidak langsung hal ini akan berdampak pada suatu sistem pembangunan yang tidak bisa berjalan semestinya dan akan mengalami perlambatan yang berdampak pada terjadinya ketimpangan.

2.2.3 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2016) dalam bukunya menjelaskan bahwa Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda, dimana pada satu sisi pertumbuhan ekonomi merupakan suatu bentuk gambaran perekonomian yang telah melakukan perkembangan sehingga tercapainya tingkat kemakmuran dan disisi yang lain dimana pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diartikan sebagai suatu bentuk gambaran dalam perekonomian baik dari segi permasalahan dalam kurun waktu jangka panjang.

Terdapat 3 permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang, diantaranya:

1. Terdapat adanya perbedaan pada tingkat pertumbuhan ekonomi potensial yang dicapai dengan jumlah pertumbuhan ekonomi yang seharusnya dicapai
2. Peningkatan potensi pertumbuhan itu sendiri
3. Terdapat adanya keteguhan dalam pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sekarang dan selanjutnya.

Sukirno (2016) dalam bukunya menyebutkan Teori pertumbuhan ekonomi berdasarkan berbagai pandangan, diantaranya:

1. Pandangan Klasik
 - a. Peranan sistem pasaran bebas, dalam hal ini Smith berpandangan bahwa dengan adanya mekanisme pasar dalam setiap kegiatan perekonomian, maka diharapkan akan terciptanya perekonomian yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang kuat

- b. Perluasan pasar, dalam hal ini Smith menekankan untuk terjadinya perluasan pasar bahkan dalam lingkup internasional, sehingga dengan begitu akan terjadinya perluasan dalam pemasaran barang dan jasa yang mendorong bertambahnya jumlah produksi oleh suatu perusahaan
- c. Spesialisasi dan kemajuan teknologi, dalam hal ini kemajuan dalam hal teknologi sangat dibutuhkan dalam suatu perekonomian. Karena pada dasarnya suatu perekonomian jika dilakukannya perluasan pasar tentu harus membutuhkan tenaga lebih dalam memproduksi suatu barang dan jasa yang akan mendorong peningkatan perekonomian suatu negara.

2. Pandangan Schumpeter

Dalam *The Theory Of Economic Development*, dimana dalam hal ini Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berlangsung secara terus menerus, dimana pertumbuhan ekonomi tersebut pada suatu waktu akan mengalami kemajuan dan adakalanya sebaliknya yaitu mengalami kemunduran.

1. Teori Harrod-Domar

Pada hakikatnya Teori Harrod-Domar ini merupakan teori yang melengkapi Teori Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Dalam hal ini Teori Harrod-Domar mengasumsikan bahwa agar seluruh barang modal dapat digunakan secara sepenuhnya dan jumlah permintaan harus sama jumlahnya dengan kenaikan barang modal sebagai akibat dari adanya investasi pada masa lalu.

2. Teori Neo Klasik

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Solow yang mengemukakan bahwa terjadinya pertumbuhan ekonomi diawali karena adanya pertumbuhan dan perkembangan pada faktor penawaran agregat. Dalam hal ini yang menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah karena terdapat adanya faktor produksi dan kemajuan teknologi.

Dalam teori ini dalam pertumbuhan ekonomi tidak hanya didasarkan pada peranan tenaga kerja, akan tetapi dalam hal ini yang menjadi salah satu faktor penting adalah sumbuangan dari stok modal dan perkembangan teknologi dalam suatu pembangunan ekonomi.

2.2.4 Konsep Kemiskinan

Yacoub (2012) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan hidup yang belum mampu terpenuhi karena terdapat berbagai permasalahan yang mendasarinya.

Menurut Badan Pusat Statistik dalam mengukur kemiskinan dimana dalam hal ini Badan Pusat Statistik menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar, dimana hal tersebut didasarkan pada Handbook on Poverty and Inequality yang menganggap bahwa kemiskinan merupakan suatu bentuk ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila pengeluarannya berada dibawah garis emiskinan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Badan Pusat Statistik Garis kemiskinan dalam hal ini didasarkan pada jumlah nilai rupiah dala pemenuhan kebutuhan yang dikeluarkan seseorang, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan dan non makan

- 3 Garis kemiskinan makanan adalah jumlah besaran minimum dalam pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kurun waktu sebulan. Dimana jumlah tersebut disetarakan dengan jumlah perhari sebesar 2100 kalori dalam perhari dengan dilengkapi 52 jenis komoditas.
- 4 Garis kemiskinan non makanan adalah jumlah pengeluaran minimum yang dibutuhkan dalam pemenuhan kebtuhan non makanan seperti halnya fasilitas kesehatan, pendidikan dan berbagai aspek pendukung peningkatan kualitas hidup lainnya, dengan total komoditas 51 di perkotaan dan 47 di perdesaan.

Bappenas (2012) dalam jurnal menyebutkan bahwa Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah yang digalangkan dengan program bantuan dan jaminan sosial, diantaranya:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu bentuk bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat harus memenuhi syarat yaitu harus dalam keadaan sehat dan terdapat adanya pendidikan. Tidak hanya itu, dimana masyarakat harus termasuk dalam kategori

Rumah Tangga Sangat Miskin. Dan yang perlu diketahui bahwa pelaksanaan program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tentunya dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang terus mengalami peningkatan.

2. Program Subsidi Raskin, program ini diawali karena adanya Opsus. Hal itu dilakukan karena adanya penurunan daya beli masyarakat, kenaikan akan biaya hidup dan terjadinya penurunan pada jumlah produksi dari segi pangan sehingga jika hal tersebut tidak segera ditanggulangi maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal tersebut menjadi awal terbentuknya program tersebut yang bernama Jaringan Pengamanan Sosial kemudian berubah nama menjadi Raskin.
3. Program Jamkesmas, tujuan dari dilakukannya program ini adalah dengan tujuan untuk memberikan jaminan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang pada hakikatnya tidak mampu dalam menggunakan sistem asuransi kesehatan sosial selayaknya masyarakat yang memiliki kualitas hidup tinggi.
4. Program Kependudukan dan KB, keberhasilan program ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada angka prevelensi dalam pemakaian alat maupun obat kontrasepsi tersebut, walaupun jika dilihat lebih jauh peningkatan tersebut belum terlihat secara signifikan.

2.2.5 Konsep Tingkat Pengangguran Terbuka

Aukirno (2016) dalam bukunya menjelaskan bahwa Pengangguran merupakan suatu bentuk kondisi yang dialami seseorang yang sudah masuk dalam golongan angkatan kerja, akan tetapi karena terdapat suatu alasan menjadikan seseorang belum bisa bekerja. Dalam hal ini untuk mengukur sejauh mana tingkat pengangguran yang terjadi pada suatu wilayah tersebut dalam bentuk persen dan didapatkan dengan perbandingan antara jumlah angka orang yang menganggur dengan jumlah angkatan kerja. Dalam hal ini seseorang yang tidak bekerja tidak semua bisa dikatakan sebagai orang yang menganggur, akan tetapi dalam hal ini pengangguran tersebut terjadi apabila seseorang tersebut tidak secara aktif mencari pekerjaan saat tidak sedang bekerja. Sehingga dalam hal ini ibu rumah tangga dan

mahasiswa tidak bisa dikategorikan kedalam orang yang menganggur, karena pada dasarnya mereka belum mencari pekerjaan walaupun pada hakikatnya sudah termasuk kedalam angkatan kerja.

Sukirno (2016) dalam bukunya menyebutkan terdapat 3 jenis pengangguran yang didasarkan pada keadaannya, diantaranya:

1. Pengangguran Friksional

Suatu kondisi dimana seorang pekerja yang meninggalkan pekerjaannya untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya secara pribadi dan tentunya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Golongan pengangguran yang diklasifikasikan kedalam pengangguran friksional, diantaranya:

- a. Tenaga kerja yang pertama kali mencari kerja
- b. Seorang pekerja yang meninggalkan pekerjaan demi mencari pekerjaan baru
- c. Seorang pekerja yang berhenti dan masuk kembali kedalam pasaran buruh

2. Pengangguran Struktural

Mankiw, N & Sungkono (2018) Menjelaskan bahwa pengangguran struktural merupakan suatu bentuk pengangguran dimana dalam hal ini kurang memadainya jumlah pekerjaan yang tersedia dalam pasar tenaga kerja dengan besaran jumlah orang yang menginginkan pekerjaan tersebut.

3. Pengangguran Konjungtur

Tingkat pengangguran terbuka merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang sudah termasuk kedalam angkatan kerja akan tetapi belum mempunyai suatu pekerjaan hal tersebut dikarenakan seorang pekerja tersebut malas dalam mencari pekerjaan dan juga bisa disebabkan karena faktor belum mendapatkan pekerjaan walaupun sudah mencari pekerjaan secara maksimal

2.2.6 Konsep Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik Pembangunan Manusia merupakan suatu alat ukur dalam mengukur capaian suatu pembangunan manusia yang didasarkan pada suatu kualitas hidup suatu masyarakat. Dalam indeks pembangunan manusia dimana

dalam hal ini didasarkan pada 3 dimensi diantaranya, panjang umur dan sehat, pengetahuan dan tingkat kehidupan yang layak. Berdasarkan dimensi panjang umur dan kesehatan didasarkan pada tingkatan angka harapan hidup. Disamping itu pada sisi pengetahuan tentunya diukur dengan didasarkan pada rata-rata angka lama sekolah dan komponen yang terakhir didasarkan pada angka kemampuan daya beli pada suatu masyarakat terhadap kebutuhan dalam pemenuhan hidupnya.

Menurut Badan Pusat Statistik dengan didasarkan pada konsep dasar dimana UNDP menetapkan terdapat 2 ide dasar yang dijadikan acuan dalam pembangunan manusia, diantaranya:

1. Manusia

Dalam hal ini bahwa pembangunan manusia tersebut harus didasarkan untuk peningkatan dari segi kualitas kehidupan masyarakat dibandingkan hanya dengan didasarkan pada asumsi dimana dengan adanya pertumbuhan ekonomi pada suatu masyarakat maka secara langsung akan meningkat kesejahteraan suatu masyarakat. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan pada suatu pembangunan dan bukan merupakan suatu tujuan akhir.

2. Kesempatan

Dalam hal ini dimana bahwa prinsip utama pembangunan manusia didasarkan bahwa manusia diberikan kebebasan dalam menjalankan kehidupannya, sehingga dalam hal ini bahwa dalam suatu pembangunan manusia dimana harus adanya pengembangan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang itu sendiri.

3. Pilihan

Dalam pembangunan manusia dimana pada dasarnya manusia tersebut diberikan kebebasan dalam melakukan pilihan. Oleh karena itu dalam pembangunan

manusia tersebut harus adanya lingkungan yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki suatu masyarakat.

Dalam hal ini UNDP mengukur capaian IPM dengan didasarkan pada 3 dimensi utama, diantaranya:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Kategori IPM berdasarkan UNDP terdapat 4 kategori, diantaranya adalah:

1. Angka harapan hidup (Tahun) 25-85
2. Angka melek huruf (%) 0-100
3. Rata-rata lama sekolah (Tahun) 0-15
4. Daya beli (Rupiah PPP) 300.000-732-720

Statistik (2015) mnrnjelaskan perbedaan mendasar dari indikator IPM antara metode lama dan metode baru menurut UNDP adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Umur panjang dan hidup sehat	Angka harapan hidup saat lahir (AHH)	Angka harapan hidup saat lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka melek huruf (AMH) Kombinasi angka partisipasi kasar (APK)	Harapan lama sekolah (HLS) Rata-rata lama sekolah (RLS)
Standar hidup layak	PDB per Kapita	PNB per Kapita
Agregasi	Rata-rata aritmatik	Rata-rata geometrik

Lumbantoruan & Hidayat (2014) menjelaskan bahwa komposisi Indeks Pembangunan Manusia didasarkan pada 3 indikator diantaranya kesehatan, kualitas hidup dan juga pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang tentu akan berpengaruh terhadap kenaikan upah atau pendapatan yang akan diterimanya jika dibandingkan dengan seseorang yang pendidikannya terbilang rendah. Tidak hanya itu, dalam hal ini kesehatan juga menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam perannya pada pertumbuhan pendapatan suatu masyarakat. Karena pada dasarnya dengan semakin meningkatnya fasilitas kesehatan yang ada pada suatu daerah tentu akan meningkatkan kualitas kesehatan pada suatu masyarakat. Sehingga hal ini akan berdampak pada angka partisipasi angkatan kerja pada suatu daerah. Oleh karena itu, faktor kesehatan juga menjadi sangat penting dalam penentuan Indeks Pembangunan manusia (IPM) pada suatu daerah, dan disamping itu juga harus dibarengi dengan peningkatan pada standar hidup masyarakat yang tentunya harus dimulai dari perbaikan dari segi pendidikan.

2.2.7 Konsep Pendapatan Asli Daerah

Menurut Badan Pusat Statistik Pendapatan Asli Daerah merupakan jenis pendapatan yang diperuntukkan untuk keperluan atau segala bentuk kegiatan yang dilakukan daerah yang bersangkutan dan diperoleh dengan didasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

1. Pajak daerah merupakan suatu jenis pungutan yang didasarkan dengan peraturan yang berlaku pada suatu daerah.
2. Redistribusi daerah merupakan suatu jenis pungutan dimana pungutan tersebut dilakukan berdasarkan dengan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh pihak pemerintah secara langsung.

Sianturi (2021) menjelaskan Penyebab permasalahan yang sering terjadi dalam peningkatan pendapatan asli daerah diantaranya

1. Peran PAD masih relatif kecil

Banyaknya bantuan atau subsidi yang diberikan pihak pemerintah kepada masyarakat menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah jika didasarkan pada pemungutan pajak. Sehingga menyebabkan suatu daerah harus mendapatkan bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Karena pendapatan terbesar suatu daerah diperoleh dari bantuan pemerintah pusat.

2. Rendahnya kemampuan suatu daerah dalam hal pemungutan administrasi

Dimana pada suatu daerah pemungutan pajak yang dilakukan cenderung masih tergolong dengan biaya yang dibebankan yang cukup besar.

3. Masih lemahnya kemampuan dalam pengawasan dan perencanaan keuangan daerah

Hal tersebut menjadi faktor awal terjadinya berbagai permasalahan yang terjadi pada sistem keuangan daerah yang seharusnya dipergunakan untuk keperluan daerah dan berbagai kegiatan lainnya, sehingga hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan suatu daerah.

2.2.8 Konsep Dana Alokasi Umum

Dalam peraturan pemerintah No.55 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan suatu bentuk penerimaan yang bersumber dari dana alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dalam hal ini pengalokasian tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk pemerataan dari segi kemampuan keuangan daerah itu sendiri sebagai realisasi dari adanya pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam memenuhi kebutuhan daerahnya.

Azizi (2018) menjelaskan bahwa tujuan dari adanya pengalokasian DAU tersebut adalah sebagai sarana dalam pemerataan pada suatu daerah dari segi keuangan dalam kemampuannya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah dengan cara mempertimbangkan dari kedua sisi baik dari segi potensi yang dimiliki suatu daerah maupun dari segi kebutuhannya.

Halim & Kusufi (2007) menyebutkan cara yang digunakan dalam menghitung DAU dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut, diantaranya:

1. Dana Alokasi Umum tersebut akan ditetapkan dengan sekurang-kurangnya pada kisaran 26% dari penerimaan dalam negeri yang telah ditetapkan pada APBN.
2. Dana Alokasi Umum yang diperuntukkan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan besaran 10% untuk Provinsi dan 90% untuk Kabupaten/Kota.
3. Dana Alokasi Umum pada Kabupaten/Kota khusus maka akan ditetapkan berdasarkan jumlah perkalian dari DAU yang ditetapkan pada APBN.

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dimana terkait kebutuhan dalam alokasi anggaran DAU pada suatu daerah akan ditentukan dengan didasarkan pada pendekatan menggunakan fiscal gap, karena pada dasarnya kebutuhan suatu daerah terkait besarnya DAU akan ditentukan dengan didasarkan atas bagaimana potensi pada suatu daerah tersebut dan berapa besar kebutuhan suatu daerah tersebut. Sehingga adanya anggaran terkait pengadaan DAU pada suatu daerah tersebut digunakan untuk menutupi celah sebagai akibat karena adanya kebutuhan pada suatu daerah yang cukup besar melebihi besarnya jumlah penerimaan daerah yang sudah ditetapkan di awal

2.3 Pengaruh Antara Variabel Independen dengan Dependen

2.3.1 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi suatu wilayah atau daerah dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan dalam pembangunan suatu wilayah. Jika dalam suatu wilayah tercermin angka pertumbuhan ekonominya relatif mengalami peningkatan maka dapat dikatakan bahwa pembangunan dalam suatu wilayah tersebut terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan rencana pemerintah, akan tetapi apabila laju pertumbuhan dalam suatu wilayah tersebut mengalami penurunan, maka bisa dikatakan bahwa pembangunan pada suatu wilayah tersebut mengalami berbagai permasalahan dan tidak berjalan dengan baik (Hafiz, 2019). Dalam hal ini, banyak

sekali kita jumpai bahwa pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain belum mengalami pemerataan. Sehingga hal ini menjadi harapan kita bersama bahwa dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat berdampak pada peningkatan perkapita, dimana hal ini menjadi tombak awal dalam melihat tingkat kesejahteraan dalam suatu wilayah semakin meningkat sehingga akan berdampak pada pengurangan angka ketimpangan dalam pembangunan suatu wilayah. Sehingga dengan demikian hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan adaah memiliki hubungan aau berpengaruh secara negatif.

2.3.2 Hubungan antara Jumlah Penduduk Miskin dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Dalam hal ini jumlah penduduk miskin tentu sangat erat hubungannya dengan ketimpangan pembangunan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa kemiskinan tersebut disebabkan karena pada suatu masyarakat yang pada dasarnya masih memiliki keterbatasan dalam mengakses segala bentuk fasilitas seperti halnya kesehatan maupun pendidikan yang layak seperti masyarakat pada umumnya. Maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap besarnya jumlah upah yang diterima oleh suatu masyarakat dan berakibat pada peningkatan yang terjadi pada jumlah kemiskinan. Sehingga akan berdampak pada peningkatan besarnya ketimpangan pembangunan yang terajdi pada suatu daerah (Wicaksono, 2017).

2.3.3 Hubungan Antara TPT dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Seperti yang kita ketahui bahwa pengangguran tersebut merupakan suatu kondisi dimana seorang yang sudah memasuki usia angkatan kerja akan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Sehingga meningkatnya angka pengagguran yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pula terhadap peningkatan pada ketimpangan suatu wilayah. Karena pada dasarnya seseorang yang telah memasuki angkatan kerja tersebut jika belum memiliki kontribusi dalam berbagai jenis kegiatan eknomi sehingga sangat berpengaruh terhadap rendahnya produksi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Sehingga bisa dikatakan bahwa tingginya tingkat pengangguran pada

suatu daerah akan berpengaruh secara positif terhadap tingkat ketimpangan suatu daerah (Efriza, 2014).

2.3.4 Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Ketimpangan

Seperti yang kita ketahui bahwa yang menjadi tolak ukur bahwa suatu daerah memiliki kualitas hidup yang bagus baik dari segi pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan yang diperolehnya adalah dicerminkan melalui tingkat IPM pada suatu daerah tersebut. Dimana tingkat kesejahteraan suatu masyarakat pada suatu daerah tersebut secara tidak langsung mencerminkan kondisi ketimpangan yang sedang terjadi pada suatu daerah, baik dalam kondisi yang tinggi ataupun rendah.

Pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah tentunya terdapat adanya peran besar dari sektor pendidikan, karena seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan seseorang akan mempengaruhi kualitas hidupnya untuk semakin produktif sehingga akan berdampak pada rendahnya tingkat ketimpangan. Sehingga dalam teori human capital, dimana peroduktivitas setiap orang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antara indeks pembangunan manusia dengan ketimpangan memiliki hubungan yang negatif yaitu dimana hal ini membuktikan bahwa dalam teori pertumbuhan endogen dimana dalam teori tersebut yang memfokuskan pembangunan manusia erujuan untuk meningkatkan pertumbuhan yang berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pembangunan (Nurhuda et al., 2013).

2.3.5 Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dengan Ketimpangan

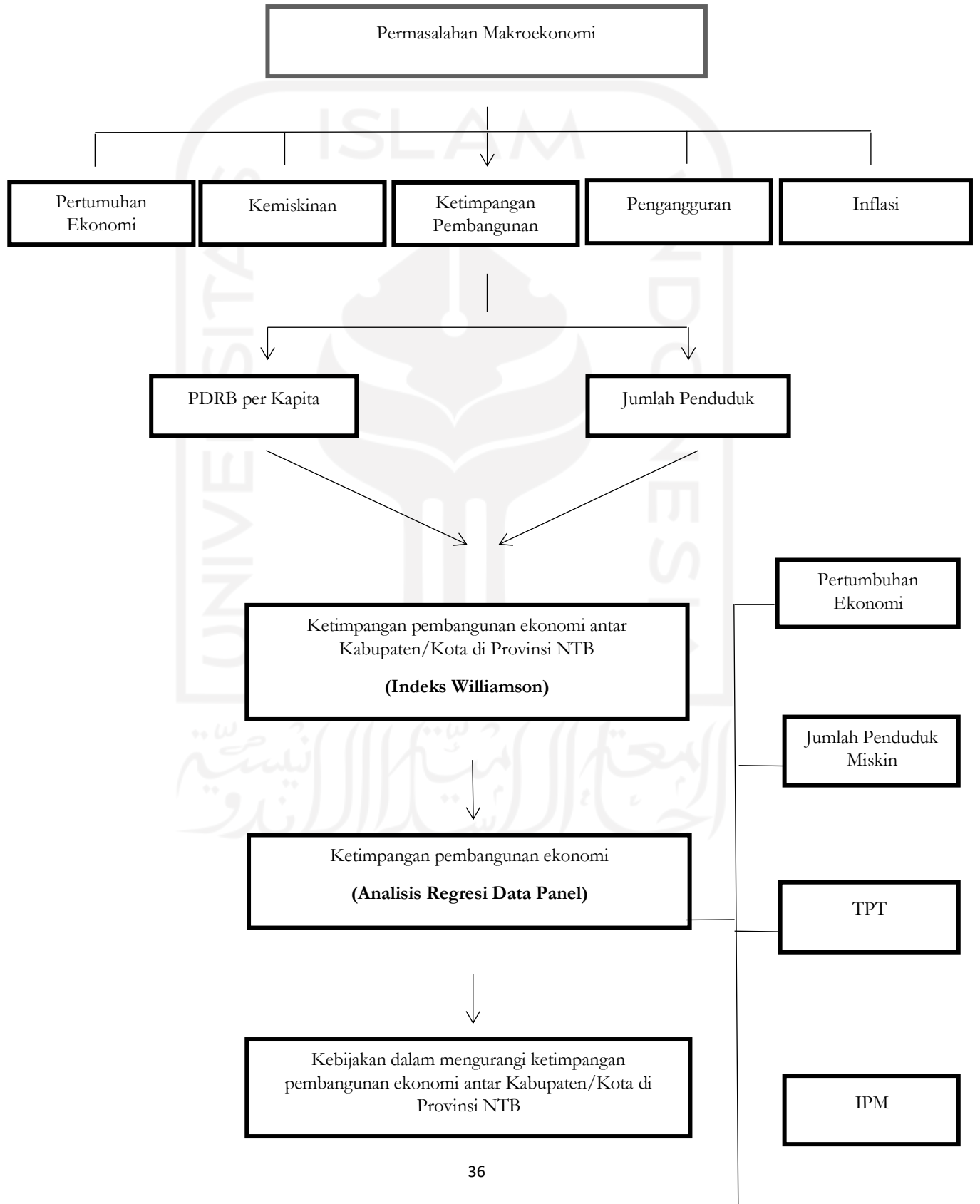
Seperti yang kita ketahui bahwa adanya pendapatan asli daerah yang diperoleh dari berbagai sumber seperti halnya dari pajak daerah dan redistribusi daerah. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa adanya peningkatan yang terjadi pada pendapatan asli daerah akan secara langsung akan berdampak dan memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dimana Pendapatan Asli Daerah yang semakin besar dan merata pada suatu daerah akan secara langsung mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga akan menurunkan tingkat

ketimpangan pembangunan antar daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kenaikan pada pendapatan asli daerah yang terjadi pada suatu wilayah akan secara langsung memiliki pengaruh secara negatif dimana kenaikan dari sisi PAD akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi pada suatu daerah (Nurhuda et al., 2013).

2.3.6 Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dengan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

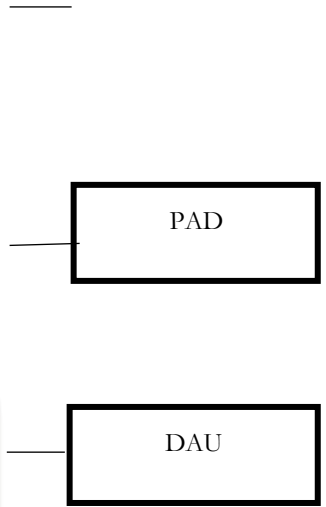
Pada dasarnya tujuan dari pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan untuk tujuan pemerataan dalam melihat kemampuan terhadap keuangan antara daerah. Sehingga dalam hal ini anggaran Dana Alokasi Umum yang besar akan secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tersebut apabila alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk membangun berbagai kegiatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah yang tentunya harus didukung dengan berbagai kebijakan. Sehingga dengan begitu akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tersebut, sehingga adanya pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung dapat memajukan perekonomian suatu wilayah. Dan dapat kita simpulkan bahwa dengan semakin tingginya angka Dana Alokasi Umum yang diperuntukkan pada satu daerah akan berdampak pada penurunan ketimpangan pembangunan ekonomi pada suatu daerah (Nurhuda et al., 2013).

2.4 Kerangka Pemikiran





Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian yang telah dilakukan adalah, diantaranya:

1. Secara simultan Besarnya ketimpangan pembangunan ekonomi diduga dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, TPT, IPM, PAD dan DAU di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020
2. Secara parsial diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020
3. Secara parsial diduga jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020
4. Secara parsial diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020
5. Secara parsial diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020
6. Secara parsial diduga pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020
7. Secara parsial diduga dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder yang digunakan merupakan data panel gabungan dari tahun 2016-2020 dan deret lintang (cross section) sebanyak 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Data yang digunakan dalam hal ini merupakan tingkat Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat ketimpangan pembangunan suatu wilayah pada provinsi Nusa Tenggara Barat.

3.2 Variabel Operasional

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen.

3.2.1 Variabel Dependen

Tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi (Y) merupakan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini sebagai indikator dalam menggambarkan pengaruh ketimpangan pembangunan ekonomi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020.

1. Ketimpangan Pembangunan ekonomi

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan suatu proses yang terjadi dalam suatu pembangunan. Dimana terjaidnya ketimpangan tersebut tidak bisa dipungkiri akibat adanya perbedaan dari segi demografi suatu daerah

3.2.2 Variabel Independen

Variabel pertumbuhan ekonomi (X1), jumlah penduduk miskin(X2), jumlah TPT (X3), IPM(X4) dan PAD(X5) dan DAU(X6) variabel yang diduga

mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016-2020



1. **Pertumbuhan Ekonomi**
pertumbuhan ekonomi merupakan suatu bentuk gambaran perekonomian yang telah melakukan perkembangan sehingga tercapainya tingkat kemakmuran yang dinyatakan dalam bentuk ribu.
2. **Jumlah Penduduk Miskin**
Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dalam suatu daerah yang dinyatakan dalam bentuk jiwa.
3. **Tingkat Pengangguran Terbuka**
Pengangguran merupakan suatu bentuk kondisi yang dialami seseorang yang sudah masuk dalam golongan angkatan kerja, akan tetapi karena terdapat suatu alasan menjadikan seseorang belum bisa bekerja hal tersebut bisa dinyatakan dalam persen.
4. **Indeks Pembangunan Manusia**
Pembangunan Manusia merupakan suatu alat ukur dalam mengukur capaian suatu pembangunan manusia yang didasarkan pada suatu kualitas hidup suatu masyarakat.
5. **Pendapatan Asli Daerah**
Pendapatan Asli Daerah merupakan jenis pendapatan yang diperuntukkan untuk keperluan atau segala bentuk kegiatan yang dilakukan daerah yang bersangkutan dan diperoleh dengan didasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dalam ribu.
6. **Dana Alokasi Umum**
Dana Alokasi Umum merupakan suatu bentuk penerimaan yang bersumber dari dana alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dalam hal ini pengalokasian tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk pemerataan dari segi kemampuan keuangan daerah itu sendiri sebagai realisasi dari adanya pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam memenuhi kebutuhan daerahnya yang dinyatakan dalam ribu.

3.3 Metode Analisis

Data yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dimana untuk mengukur besarnya ketimpangan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan indeks williamson, dan untuk mengetahui untuk signifikansi dengan menggunakan analisis data panel dengan pendekatan common effect, fixed effect dan random effect models dengan data time series selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016-2020. Untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis koefisien regresi Uji T atau secara individu, Uji F atau secara keseluruhan, dan koefisien determinansi atau R-square.

3.3.1 Indeks Williamson

Syafrizal dalam Dhyatmika & Atmanti (2013) dalam indeks williamson ini digunakan dalam menghitung antara perbedaan dalam ruang lingkup daerah dengan pembangunan ekonomi. Sehingga, dalam hal ini indeks ketimpangan dalam ruang lingkup daerah dapat menggambarkan terkait angka ketimpangan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dihitung dengan:

$$V_w = \frac{\sum i \sqrt{(y_i - \bar{y})^2} \chi \frac{f_i}{n}}{\bar{y}}$$

V_w = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita di kabupaten/kota i

\bar{y} = PDRB per kapita rata-rata di Provinsi Nusa Tenggara Barat

F_i = Jumlah penduduk di kabupaten/kota i

N = Jumlah penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam perhitungan dengan menggunakan alat analisis ini, bahwa semakin kecil angka yang dihasilkan, maka ketimpangan pada suatu daerahpun bisa dibilang mengalami penurunan atau rendah dan sebaliknya.

Dalam ha ini erdapa tiga kriteria dalam perhitungan indeks Williamson, yaitu

:

- a. 0,0 sampai 0,2 menunjukkan ketimpangan rendah.
- b. 0,21 sampai 0,35 menunjukkan ketimpangan sedang.
- c. > 0,35 menunjukkan ketimpangan tinggi.

3.3.2 Estimasi Regresi Data Panel

Penelitian dalam hal ini menggunakan data panel. Dalam regresi data panel tersebut terdapat beberapa keuntungan jika melakukan olah data menggunakan data panel diantaranya, menghasilkan degree of freedom karena data yang digunakan lebih banyak yang merupakan gabungan dari data cross section dan time series, tidak hanya itu dimana keuntungan lain yang bisa didapatkan adalah adanya gabungan dari kedua data tersebut secara langsung dapat memberikan manfaat seperti halnya mengatasi masalah hilangnya variabel (Widarjono, 2018).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan common effect models, fixed effect models dan random effect models.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

Y : Pertumbuhan Ekonomi (persen)

i : Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

t : Waktu (2016-2020)

β_0 : Konstanta

β_1 - β_6 : Koefisien

X1: Pertumbuhan Ekonomi (Ribuan)

X2: jumlah penduduk miskin (Jiwa)

X3: Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)

X4: IPM (-)

X5: PAD (Ribuan)

X6: DAU (Ribuan)

e : Error

3.3.2.1 Metode Common Effect

Metode common effect merupakan suatu bentuk metode pengolahan data panel yang sangat sederhana dengan hanya menggabungkan kedua jenis data tersebut yaitu data time series dan cross section tanpa didasarkan dengan adanya perbedaan antar individu dan waktu yang akan diregresi dengan menggunakan metode OLS (Widarjono, 2018). Sehingga dalam metode ini diasumsikan bahwa perilaku data pada Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat. Maka persamaan model pada metode common effect ini adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

3.3.2.2 Metode Fixed Effect

Dalam metode ini diasumsikan bahwa baik intersep maupun slope antar Kabupaten/Kota tetap sama antar waktu. Metode ini juga seringkali disamakan dengan metode Least Squares Dummy Variables (LSDV) (Widarjono, 2018). Sehingga dalam metode ini didapatkan persamaan model sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

3.3.2.3 Metode Random Effect

Dalam metode ini dengan dilakukannya pengujian dengan metode LSDV akan berakibat pada pengurangan dalam degree of freedom yang secara langsung akan menyebabkan pengurangan pada tingkat efisiensi dalam suatu parameter. Akan tetapi dalam hal ini terjadinya permasalahan tersebut dapat diatasi dengan digunakannya error terms. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam metode ini antara error terms masih saling berhubungan baik antar waktu dan juga individu (Widarjono, 2018). Maka persamaan model dalam metode ini adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + v_{it}$$

3.4 Pemilihan Model Terbaik

3.4.1 Uji Chow Test

Dalam hal ini uji chow test digunakan untuk melakukan pemilihan manakah model terbaik yang digunakan antara metode common effect atau metode fixed effect. Hal tersebut dijelaskan dengan hipotesis berikut:

H0: model yang digunakan metode common effect

H1: model yang digunakan metode fixed effect

Dengan diasumsikan bahwa :

P-value $> \alpha$ (5%) maka H0 diterima

P-value $< \alpha$ (5%) maka H0 ditolak

3.4.2 Uji Hausman Test

Dalam hal ini uji Hausman test digunakan untuk melakukan pemilihan manakah model terbaik yang digunakan antara metode random effect atau metode fixed effect. Hal tersebut dijelaskan dengan hipotesis berikut:

H0: P-value $> \alpha$ 5%, maka dapat disimpulkan bahwa metode random effect lebih baik digunakan dibandingkan dengan metode fixed effect

H1: P-value $< \alpha$ 5% , maka dapat disimpulkan bahwa metode fixed effect lebih baik digunakan dibandingkan dengan metode random effect.

3.5 Evaluasi Hasil Regresi

3.5.1 Uji T-Statistik

Dalam hal ini uji t-statistik digunakan untuk melihat terkait pengaruh variabel independen dengan variabel dependen.

1. Hipotesis negatif :

H0 : $\beta_i = 0$

Ha : $\beta_i < 0$

2. Hipotesis positif :

H0 : $\beta = 0$

$$H_a : \beta > 0$$

Dengan asumsi:

1. Jika Probab T-statistik $>$ alfa 5% , maka dapat disimpulkan menerima H_0 dan tidak terdapat adanya pengaruh secara signifikan
2. Jika Probab T-statistik $<$ alfa 5% , maka dapat disimpulkan menolak H_0 dan terdapat adanya pengaruh secara signifikan.

3.5.2 Uji F

Uji F dalam hal ini dilakukan untuk melihat terkait pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependennya. Dimana dalam hal ini adalah dengan membandingkan hasil F statistik dengan alfa 5%.

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$, tidak terdapat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq \beta_6 \neq 0$, Terdapat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

F hitung $>$ F tabel artinya menerima H_0

F hitung $<$ F tabel artinya menolak H_0 atau menerima H_1

3.5.3 Koefisien Determinasi (R^2) / R-Squared

Dalam koefisien determinasi atau R-squared bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Sehingga dalam hal ini semakin tinggi nilai R-Squared tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen tersebut bisa dikatakan memiliki hubungan yang signifikan.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan terkait tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta berbagai faktor seperti halnya pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan rentang tahun 2016-2020. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data cross section dan time series di 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun periode 2016-2020. Dalam hal ini pengujian dilakukan menggunakan analisis data panel dengan model common effect, fixed effect dan random effect, kemudian akan dilakukan pemilihan model terbaik dari ketiga model tersebut.

4.1 Analisis Deskriptif

Dalam hal ini akan dijelaskan terkait besaran tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016-2020. Tingkat ketimpangan tersebut akan diukur menggunakan Indeks Williamson dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Berikut merupakan hasil perhitungan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

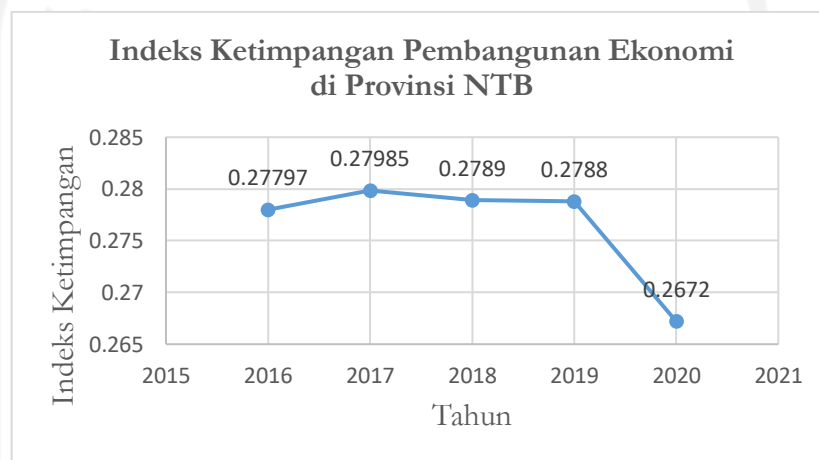
Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020

Kabupaten Lombok Barat	0.3395	0.3632	0.3618	0.3620	0.3251
Kabupaten Lombok Tengah	0.3865	0.4293	0.4273	0.4264	0.3597
Kabupaten Lombok Timur	0.4214	0.4854	0.4831	0.4818	0.3831
Kabupaten Sumbawa	0.2857	0.2912	0.2870	0.2857	0.2759
Kabupaten Dompu	0.2159	0.2105	0.2062	0.2057	0.2133
Kabupaten Bima	0.2936	0.3037	0.3007	0.2999	0.2835
Kabupaten Sumbawa Barat	0.1646	0.0508	0.0699	0.0741	0.1679
Kabupaten Lombok Utara	0.2039	0.1987	0.1951	0.1939	0.2001
Kota Mataram	0.2896	0.2952	0.2917	0.2921	0.2840
Kota Bima	0.1790	0.1705	0.1665	0.1664	0.1798
Rata-rata	0.27797	0.27985	0.2789	0.2788	0.2672
	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : Data Sekunder Badan Pusat Statistik diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson terkait tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi pada tahun 2016-2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2016 tercatat bahwa nilai indeks williamson sebesar 0,27797 dalam hal ini jika dilihat besaran rata-rata tersebut menunjukkan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. menunjukkan adanya ketimpangan yang tergolong rendah. Kemudian hal pada tahun 2017 tercatat ketimpangan sedikit mengalami kenaikan dengan dibuktikan dari indeks williamsonnya sebesar 0,27985 atau naik sebesar 0,00188, lalu pada tahun 2018

sedikit mengalami penurunan dengan angka indeks williamson sebesar 0.2789, begitu juga pada tahun 2019 dimana dalam hal ini terjadi penurunan dengan indeks williamson sebesar 0,2788 dan penurunan juga terus terjadi hingga tahun 2020 hal ini dibuktikan dengan angka indeks williamson tercatat sebesar 0.2672. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016-2020 masih relatif rendah, hal ini dibuktikan dengan perolehan angka indeks williamson masih pada rentang 0-0,35.



Gambar 4.1 Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan grafik tersebut, ketimpangan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat jika dilihat dari hasil perhitungan indeks williamson pada tahun 2016-2020 tercatat cenderung mengalami penurunan terutama pada kurun waktu tiga tahun terakhir dan tergolong dalam ketimpangan yang relatif rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat terbilang terus mengalami peningkatan dan distribusi pendapatan cenderung sudah mulai merata walaupun masih belum terlihat secara signifikan

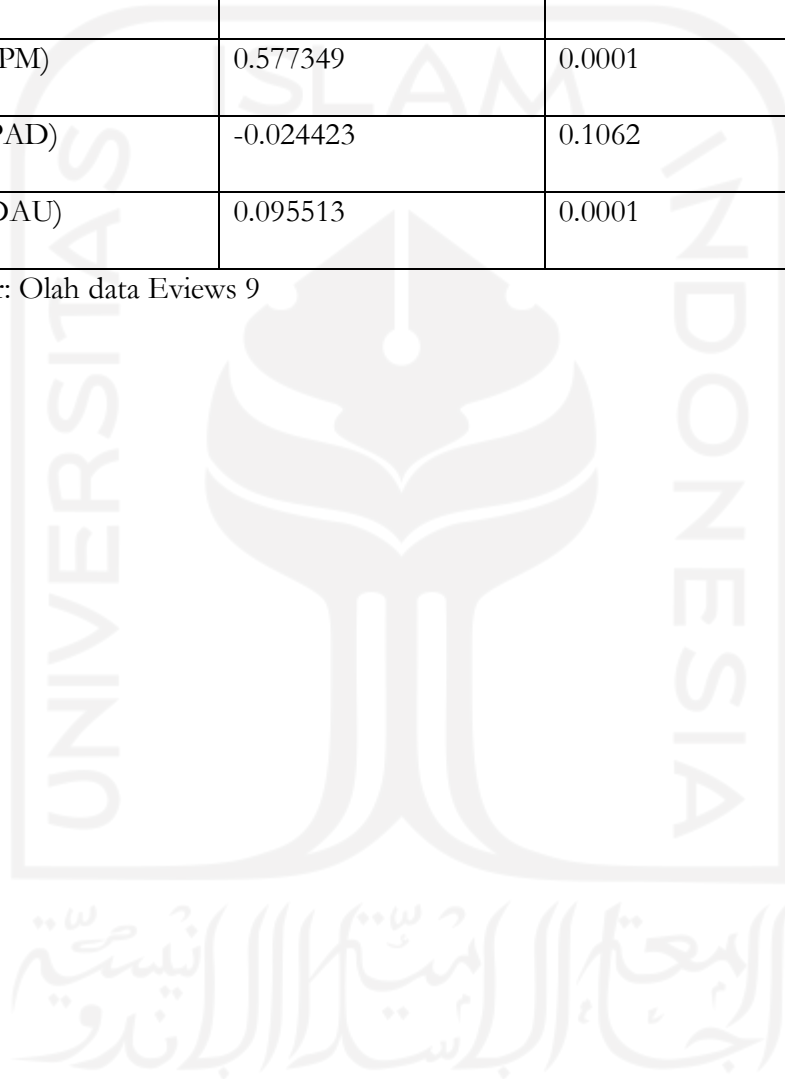
4.2 Pemilihan Model Regresi

Tabel 4.2 Hasil Estimasi Metode Common Effect

Variable	Coefficient	Prob
----------	-------------	------

C	-3.930421	0.0000
LOG(PE)	-0.020160	0.0301
LOG(KEMISKINAN)	0.119555	0.0000
TPT	0.000771	0.7947
LOG(IPM)	0.577349	0.0001
LOG(PAD)	-0.024423	0.1062
LOG(DAU)	0.095513	0.0001

Sumber: Olah data Eviews 9



Tabel 4.3 Hasil Estimasi Metode Fixed Effect

Variable	Coefficient	Prob
C	-2.121133	0.6241
LOG(PE)	0.053146	0.1118
LOG(KEMISKINAN)	0.173673	0.3400
TPT	-0.002717	0.4417
LOG(IPM)	0.367133	0.5559
LOG(PAD)	-0.029363	0.1685
LOG(DAU)	0.008967	0.9613

Sumber: Olah data Eviews

Tabel 4.4 Hasil Estimasi Metode Random Effect

Variable	Coefficient	Prob
C	-3.931599	0.0000
LOG(PE)	-0.018889	0.0395
LOG(KEMISKINAN)	0.120248	0.0000
TPT	0.000546	0.8401
LOG(IPM)	0.575931	0.0001
LOG(PAD)	-0.024594	0.0897
LOG(DAU)	0.095311	0.0001

Sumber: Olah data Eviews 9

Berdasarkan ketiga model di atas, selanjutnya akan dilakukan pemilihan model terbaik menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman.

4.2.1 Uji Chow

H0 : memilih menggunakan metode estimasi *common effect*

H1 : memilih menggunakan metode estimasi *fixed effect*



Tabel 4.4 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FIXED

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.022307	(9,34)	0.0671
Cross-section Chi-square	21.436830	9	0.0108

Sumber: Olah data Eviews 9

Dari hasil pengujian yang dilakukan diatas dengan menggunakan uji chow didapatkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar $0.0671 < \alpha (0.1)$ maka H0 ditolak, artinya dalam hal ini model yang tepat digunakan adalah fixed effect model.

4.2.2 Uji Hausman

H0 :model yang digunakan *random effect*

H1 :model yang digunakan *fixed effect*

Tabel 4.5 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RANDOM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.555436	6	0.3050

Sumber : Olah data Eviews 9

Jadi, berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji Hasuman sehingga diperoleh nilai probabilitas Cross Section random sebesar $0.3050 > \alpha (0.05)$ maka H0 diterima, artinya dalam hal ini model yang tepat adalah dengan menggunakan metode random effect.

4.3 Analisis Model Regresi Terpilih (Random Effect)

Berdasarkan kedua uji yang telah dilakukan yaitu uji Chow dan uji Hausman, didapatkanlah model terbaik yang paling tepat digunakan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Tabel 4.6 Hasil Estimasi Regresi Random Effect

Dependent Variable: KETIMPANGAN

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/13/22 Time: 15:27

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 50

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.931599	0.518083	-7.588742	0.0000
LOG(PE)	-0.018889	0.008893	-2.123908	0.0395
LOG(KEMISKINAN)	0.120248	0.020230	5.944193	0.0000
TPT	0.000546	0.002691	0.202986	0.8401
LOG(IPM)	0.575931	0.132503	4.346535	0.0001
LOG(PAD)	-0.024594	0.014166	-1.736173	0.0897
LOG(DAU)	0.095311	0.021858	4.360438	0.0001
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.005618	0.0439
Idiosyncratic random			0.026213	0.9561
Weighted Statistics				
R-squared	0.922707	Mean dependent var		0.249396
Adjusted R-squared	0.911921	S.D. dependent var		0.095771
S.E. of regression	0.028423	Sum squared resid		0.034738
F-statistic	85.55363	Durbin-Watson stat		1.643622
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				

R-squared	0.934312	Mean dependent var	0.276558
Sum squared resid	0.035893	Durbin-Watson stat	1.590726

Sumber : Olah data Eviews 9

Model regresi berganda *random effect* pada tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi:

$$Y = -0.018889 + 0.120248 + 0.000546 + 0.575931 - 0.024594 + 0.095311$$

4.3.1 Uji t

Uji t adalah suatu bentuk uji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam penelitian tersebut terdapat adanya pengaruh antara variabel independen seperti ketimpangan pembangunan ekonomi dengan variabel dependen seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah dan dana aokasi umum. Dalam penelitian ini apakah terdapat adanya pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan dependen di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini akan dilakukan perbandingan antara nilai alpha dengan probabilitas.

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi diatas pada model *random effect*, pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai koefisien dengan besaran -0.018889 dengan probabilitas sebesar 0.0395. Dimana angka probabilitas tersebut sebesar $0.0395 < \alpha 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi diatas pada model *random effect*, pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai koefisien dengan besaran 0.120248 dengan probabilitas sebesar 0.0000. Dimana angka probabilitas tersebut sebesar $0.0000 < \alpha 0.05$.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh positif atau berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi diatas pada model *random effect*, pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai koefisien dengan besaran 0.000546 dengan probabilitas sebesar 0.8401. Dimana angka probabilitas tersebut sebesar $0.8401 > \alpha 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Pengaruh Indeks pembangunan manusia terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi diatas pada model *random effect*, pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai koefisien dengan besaran 0.575931 dengan probabilitas sebesar 0.0001. Dimana angka probabilitas tersebut sebesar $0.0001 < \alpha 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh positif atau berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi diatas pada model *random effect*, pendapatan asli daerah mempunyai nilai koefisien dengan besaran -0.024594 dengan probabilitas sebesar 0.1456. Dimana angka probabilitas tersebut sebesar $0.0897 < \alpha 0.1$ (10%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif atau berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Pengaruh dana alokasi umum terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi diatas pada model *random effect*, dana alokasi umum mempunyai nilai koefisien dengan besaran 0.09531 dengan probabilitas sebesar 0.0001. Dimana angka probabilitas tersebut sebesar $0.0001 < \alpha$ 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh positif atau berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.3.2 Uji F

Dalam hal ini akan dilakukan Uji F yang merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam penelitian tersebut terdapat adanya pengaruh secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen. Seperti halnya variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Hal ini diketahui dengan membandingkan antara probabilitas nilai Uji F dengan besaran nilai alpha 0.05.

Tabel 4.7 Hasil Uji F

Variabel	F-Statistic	F-Probabilitas
Pertumbuhan ekonomi	85.55363	0.000000
Jumlah Penduduk Miskin		
Tingkat Pengangguran Terbuka		
Indeks Pembangunan Manusia		
Pendapatan Asli Daerah		
Dana Alokasi Umum		

Sumber : Olah data Eviews 9

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan didapatkan bahwa nilai probabilitas sebesar $0.000000 < \alpha$ 0.05, artinya H_0 ditolak sehingga dapat

disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.



4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.8 Koefisien Determinasi R^2

Variabel	F-Statistic
Pertumbuhan ekonomi	0.922707
Jumlah Penduduk Miskin	
Tingkat Pengangguran Terbuka	
Indeks Pembangunan Manusia	
Pendapatan Asli Daerah	
Dana Alokasi Umum	

Sumber : Olah data Eviews 9

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan model terpilih yaitu random effect models didapatkan nilai koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0.922707. Dimana dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel independen seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu ketimpangan pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Barat sebesar 92.27% sedangkan sisanya 8.73% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan random effect models dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh secara signifikan atau berpengaruh secara negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan besaran nilai koefisien -0.018889. Dimana hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi

kenaikan sebesar 1 persen pada variabel pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi sebesar 0.018889 di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016-2020. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hafiz (2019) sehingga hal ini menjadi harapan kita bersama bahwa dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat berdampak pada peningkatan perkapita, dimana hal ini menjadi tombak awal dalam melihat tingkat kesejahteraan dalam suatu wilayah semakin meningkat sehingga akan berdampak pada pengurangan angka ketimpangan dalam pembangunan suatu wilayah.

Adanya penurunan ketimpangan yang terjadi pada Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat karena pada dasarnya dalam hal ini terdapat adanya optimalisasi pada anggaran yang telah dialokasikan terhadap daerah tersebut, sehingga terdapat adanya kenaikan aktivitas dalam berbagai sektor yang pada dasarnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.

Penurunan ketimpangan pembangunan tersebut juga karena terdapat adanya investasi yang pada daerah tersebut, sehingga dengan adanya investor masuk kedalam suatu daerah maka secara tidak langsung akan mendorong percepatan perkembangan perekonomian suatu daerah, walaupun investasi yang cukup besar masih terdapat di beberapa wilayah, akan tetapi secara perlahan adanya investor tersebut dapat menurunkan angka ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.4.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode random effect dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin secara parsial berpengaruh secara signifikan atau berpengaruh secara positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan besaran nilai koefisien 0.120248. Dimana hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan sebesar 1 jiwa pada variabel jumlah penduduk miskin, maka akan menaikkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi sebesar 0.120248 persen di

Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kenaikan pada variabel tersebut maka sudah dapat dipastikan bahwa akan mempengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam hal ini sejalan dengan penelitian Wicaksono (2017) dimana jumlah penduduk miskin tentu sangat erat hubungannya dengan ketimpangan pembangunan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa kemiskinan tersebut disebabkan karena pada suatu masyarakat yang pada dasarnya masih memiliki keterbatasan dalam mengakses segala bentuk fasilitas seperti halnya kesehatan maupun pendidikan yang layak seperti masyarakat pada umumnya. Maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap besarnya jumlah upah yang diterima oleh suatu masyarakat dan berakibat pada peningkatan yang terjadi pada jumlah kemiskinan.

Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam hal ini kebijakan pemerintah yang telah diberlakukan selama ini sudah memperlihatkan hasil yang cukup baik jika dilihat dari segi penurunan angka kemiskinan, hal tersebut mencerminkan bahwa kebijakan tersebut perlu dipertahankan dan jika dimungkinkan dari segi anggaran juga perlu adanya tambahan untuk mendorong terlaksananya beberapa kebijakan seperti halnya dalam bentuk PKH, BNPT dan sebagainya. Tidak hanya itu dimana dalam hal ini seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut adalah petani sehingga adanya kenaikan dalam nilai tukar petani memberikan dampak baik dari segi perekonomian yang secara perlahan dimungkinkan akan menurunkan angka kemiskinan.

4.4.3 Pengaruh TPT terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode random effect dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka secara parsial tidak terdapat adanya pengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016-2020 dengan besaran nilai koefisien 0.000546. Dimana hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat pengangguran baik dengan jumlah kecil maupun

besar bisa dikatakan secara tidak langsung belum mampu mempengaruhi besaran ketimpangan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal ini masih sesuai dengan penelitian yang dilakukan Harun & Maski (2013) bahwa jika dilihat dari sisi tenaga kerja, dimana pada daerah tertinggal tentu masyarakat akan menginginkan untuk lebih mengembangkan kemampuannya yang tentunya akan berpengaruh terhadap sisi pendapatannya. Sehingga banyak yang kita lihat bahwa penduduk pada daerah tertinggal memilih untuk mencari pekerjaan di daerah kota yang tentunya dengan jumlah gaji yang jauh jika dibandingkan dengan daerah desa. Sehingga hal ini tentu akan berpengaruh terhadap jumlah pengangguran yang ada di daerah tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan bahwa dengan jumlah pengangguran yang kadang naik dan turun belum mampu mempengaruhi besarnya ketimpangan yang terjadi, karena pada hakikatnya masyarakat yang cenderung berada pada daerah tertinggal akan mencari pekerjaan dengan terus mengembangkan kemampuannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini di beberapa daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat banyak penduduknya memilih untuk mengembangkan skill dan pengetahuannya untuk bisa mencari pekerjaan yang jauh lebih layak, sehingga hal ini tentu akan secara tidak langsung dapat mengurangi pengangguran pada daerah tersebut. Dan dapat dipastikan bahwa tinggi rendahnya jumlah pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum mampu mempengaruhi naik turunnya ketimpangan pembangunan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020.

4.4.4 Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode random effect dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia secara parsial memiliki pengaruh secara signifikan atau berpengaruh secara positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2020 dengan besaran nilai koefisien 0.575931. Dimana hal ini menunjukkan bahwa pada dengan besaran IPM sebesar 1 persen maka akan meningkatkan ketimpangan sebesar 0.575931 persen sehingga dapat dikatakan

bahwa besarnya indeks pembangunan manusia tersebut dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan yang terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal ini sesuai dengan (Brata, 2002) dimana peningkatan yang terjadi pada indeks pembangunan manusia pada suatu wilayah belum tentu hal tersebut juga akan terjadi pada daerah lainnya sehingga hal ini bisa menjadi faktor awal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas manusia dari suatu daerah dengan daerah lain dalam suatu wilayah tidak merata maka sudah bisa dipastikan akan menjadi titik awal terjadinya suatu ketimpangan. Sehingga wilayah dengan penduduk yang mempunyai kualitas lebih atau dengan keterampilan mendukung yang akan menurunkan ketimpangan daerahnya.

Karena seperti yang kita ketahui bahwa indeks pembangunan manusia suatu daerah bisa dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraannya. Jika suatu daerah mempunyai akses pendidikan yang cukup dan fasilitas kesehatan yang baik maka secara tidak langsung penduduk tersebut akan memperoleh tingkat upah yang tinggi di dunia kerja, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan suatu masyarakat. Sehingga tentu hal ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan hal ini juga akan terjadi pada masyarakat yang kurang mempunyai akses pendidikan yang cukup dan fasilitas kesehatan seperti halnya pengadaan rumah sakit, tentu kualitas masyarakat tersebut akan berbeda dengan masyarakat dengan kualitas hidup yang terpenuhi.

Sehingga sudah bisa dipastikan bahwa adanya perbedaan kualitas hidup suatu masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memiliki dampak atau pengaruh secara langsung terhadap keadaan suatu wilayah tersebut atau dalam hal ini akan terjadinya ketimpangan dari segi pembangunan ekonomi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat .

4.4.5 Pengaruh PAD terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode random effect dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial

berpengaruh secara signifikan atau berpengaruh secara negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan besaran nilai koefisien -0.024594 . Dimana hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan variabel pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1 persen, maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan ekonomi sebesar 0.024594 persen. Hal ini disebabkan karena terdapat adanya kenaikan PAD maka secara langsung akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi atau penerimaan pada Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.

Karena pada dasarnya adanya PAD tersebut merupakan suatu bentuk sumber pendanaan yang diperoleh pemerintah dalam melakukan pembangunan pada daerahnya dan diharapkan dapat mampu memberikan perubahan pada daerah tersebut.

4.4.6 Pengaruh DAU terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode random effect dapat disimpulkan bahwa dana alokas umum secara parsial berpengaruh secara signifikan atau berpengaruh secara positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan besaran nilai koefisien 0.0001 . Dimana hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan variabel dana alokasi umum sebesar Rp 1, maka akan meningkatkan ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0.095311 persen.

Dalam hal ini hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan (Azizi, 2018) bahwa kenaikan yang terjadi pada dana alokasi umum pada suatu daerah akan berpengaruh terhadap kenaikan pembangunan ekonomi pada suatu daerah, hal ini dikarenakan dalam pengalokasian anggaran terkait dana alokasi umum tersebut dan terdapat adanya perubahan dari segi laju pertumbuhan ekonomi belum cukup merata pada setiap daerahnya sehingga berakibat pada meningkatnya ketimpangan pembangunan ekonomi pada suatu daerah.

Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kenaikan yang terjadi pada dana alokasi umum pada setiap daerah akan berpengaruh secara langsung terhadap kenaikan pada angka ketimpangan pembangunan, hal ini dikarenakan pada setiap daerah belum dapat dipastikan bahwa tingginya angka DAU tersebut belum tentu dapat menurunkan angka ketimpangan, walaupun pada dasarnya adanya dana alokasi umum tersebut bertujuan untuk melakukan pemerataan dalam keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sebagai upaya dalam pengurangan angka ketimpangan. Akan tetapi hal tersebut belum bisa terealisasi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dikarenakan pengalokasian DAU tersebut Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya merata di semua daerah. Hal ini dikarenakan adanya alokasi anggaran yang hanya diperuntukkan pada daerah tertentu dengan potensi yang cukup, karena pada dasarnya alokasi anggaran DAU tersebut dianggarkan berdasarkan potensi yang dimiliki suatu wilayah, sehingga dalam hal ini wilayah dengan jumlah PNS terbanyaklah yang menerima alokasi dana yang cukup. Oleh karena itu dalam hal ini dibutuhkan pemerataan pada setiap wilayah karena dengan adanya pemerataan tersebut dimungkinkan untuk terjadinya pemerataan dari segi ekonomi dan terlaksananya tujuan alokasi DAU tersebut yang secara perlahan akan menurunkan angka ketimpangan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pengaruh antara variabel independen dengan dependen yaitu pertumbuhan ekonomi, jumlah kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli daerah dengan ketimpangan pembangunan ekonomi di Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016-2020 yang dijelaskan sebelumnya, sehingga dapat diperoleh beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara simultan dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia pendapatan asli daerah dan dana aokasi umum.
2. Pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Jumlah penduduk miskin secara parsial berpengaruh secara positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga semakin tingginya jumlah kemiskinan maka akan berpengaruh terhadap tingginya angka ketimpangan pembangunan ekonomi.
4. Tingkat pengangguran terbuka secara parsial tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini meenunjukkan bahwa tinggi rendahnya

jumlah tingkat pengangguran belum mampu mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi secara langsung.

5. Indeks pembangunan manusia secara parsial berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa ketika terjadi peningkatan pada indeks pembangunan manusia suatu daerah maka secara langsung akan meningkatkan angka ketimpangan pembangunan ekonomi.
6. Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. dalam hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya jumlah pendapatan asli daerah maka akan menurunkan angka ketimpangan pembangunan ekonomi.
7. Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. dalam hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya jumlah pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan angka ketimpangan pembangunan ekonomi.

5.2 Implikasi

1. Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran kebijakan pemerintah yang telah diberlakukan selama ini sudah memperlihatkan hasil yang cukup baik jika dilihat dari segi penurunan angka kemiskinan maupun pengangguran, hal tersebut mencerminkan bahwa kebijakan tersebut perlu dipertahankan dan jika dimungkinkan dari segi anggaran juga perlu adanya tambahan untuk mendorong terlaksananya beberapa kebijakan. Tidak hanya itu dimana dalam hal ini pemerintah daerah juga dituntut untuk terus menyediakan segala bentuk lembaga pelatihan di setiap daerah, hal ini dikarenakan masih banyaknya tingkat pengangguran. Sehingga hal tersebut dimungkinkan untuk tersedianya lebih banyak lembaga pelatihan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat atau penduduk di setiap Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan untuk para masyarakat mendapatkan pekerjaan yang lebih layak yang akan menurunkan pengangguran secara perlahan sehingga akan

berpengaruh terhadap penurunan angka ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Alokasi anggaran terkait Dana Alokasi Umum yang dilakukan belum mampu mengurangi tingkat ketimpangan, hal ini dikarenakan adanya alokasi anggaran yang hanya diperuntukkan pada tertentu dengan potensi yang cukup, karena pada dasarnya alokasi anggaran DAU tersebut dianggarkan berdasarkan potensi yang dimiliki suatu wilayah, sehingga dalam hal ini wilayah dengan jumlah PNS terbanyaklah yang menerima alokasi dana yang cukup. Oleh karena itu dalam hal ini dibutuhkan pemerataan alokasi anggaran DAU pada setiap wilayah karena dengan adanya pemerataan tersebut dimungkinkan untuk terjadinya pemerataan dari segi ekonomi dan terlaksananya tujuan alokasi DAU yaitu untuk melakukan pemerataan keuangan daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut yang secara perlahan akan menurunkan angka ketimpangan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera*. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 7(1), 26–34.
- Autor, N. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Krtimpangan Pendapatan di Jawa Tengah 2010-2017*. In Advanced Optical Materials (Vol. 10, Issue 1). Universitas Islam Indonesia.
- Azizi, M. (2018). *Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2005 – 2014*. JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset Dan Inovasi), 2(1), 1–32.
- Bappenas. (2012). *Rencana Aksi Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012-2014*.
- Brata, A. G. (2002). *Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 7(2), 113–122.
- Dewi, Ida Ayu Indah Utami ., budhi, Made Kemar Sri., Sudirman, W. (2011). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. 68–80.
- Dhyatmika, K. W., & Atmanti, H. D. (2013). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran*. Diponegoro Journal Of Ecomonics, 2, 2.
- Efriza, U. (2014). *Analisis Kesenjangan Pendapatan antar Kabupaetn/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal*. Jurnal Ilmiah, 16.
- Faiz, A. Al. (2011). *analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, tingkat pengangguran dan panjang jalan terhadap ketimpangan Antar Wilayah Menurut Tipologi Klassen Pada 25 Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat tahun 2004-2008*. In Fakultas Ekonomi Universitas.Universitas Diponegoro. universitas diponegoro.
- Ginting, A. M. (2015). *Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013*. 45–58.
- Hafiz, M. (2019). *ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PULAU JAWA TAHUN 2001-2017*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun, L., & Maski, G. (2013). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. Journal of Petrology, 369(1), 17.

- Lestari, D. P. (2017). *Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Mamminasata*. In UIN Alauddin Makassar. UIN Alauddin Makassar.
- Lumbantoruan, E., & Hidayat, P. (2014). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Provinsi-Provinsi Di Indonesia (Metode Kointegrasi)*. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 2(2), 14–27.
- Mankiw, N, G., & Sungkono, C. (2018). Pengantar Ekonomi Makro (7th ed.). Salemba Empat.
- Mopangga, H. (2011). *Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo*. Trikonomika, 10(1), 40–51.
- Ningrum, A. P. (2018). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2015*. universitas islam indonesia.
- Nurhuda, R., Muluk, M. R. K., & Prasetyo, W. Y. (2013). *Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(4), 110–119.
- Sianturi, D. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Fiscal Stress terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Bagian Utara*. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, 1(3), 82–91.
- Statistik, badan pusat. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia 2014 (Metode Baru)*.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Modern (6th ed.)*. PT Raja Grafindo persada.
- Todaro, M., & Smith, S. (2015). *Economic Development-Economic Policy*.
- Wicaksono, D. T. (2017). *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015*. Universitas Islam Indonesia.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika (Kelima)*. UPP STIM YKPN.
- Yacoub, Y. (2012). *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. 8, 176–185.

LAMPIRAN

Lampiran I

Data Penelitian

Tahun	Kab_Kota	Ketim pangan	PE	Kemis Kinan	TPT	IPM	PAD	DAU
2016	Kab Lombok Barat	0.3395	14722	110.85	3.29	65.55	200549255	784744357
2017	Kab Lombok Barat	0.3632	15450	110.69	3.28	66.37	218910162	770958922
2018	Kab Lombok Barat	0.3618	15313	103.77	3.22	67.18	216921279	771028054
2019	Kab Lombok Barat	0.3620	15676	105.04	3.52	68.03	247115356	796736415
2020	Kab Lombok Barat	0.3251	14368	100.25	4.58	68.20	274456917	809546835
2016	Kab Lombok Tengah	0.3865	11772	145.37	3.38	63.22	166416246	998650731
2017	Kab Lombok Tengah	0.4293	12412	142.14	2.90	64.36	286731417	981107649
2018	Kab Lombok Tengah	0.4273	12685	130.00	2.98	65.36	187324324	985217157
2019	Kab Lombok Tengah	0.4264	13088	128.82	2.35	66.36	204512599	1032033870
2020	Kab Lombok Tengah	0.3597	12112	128.10	3.74	66.43	179527882	957311642
2016	Kab Lombok Timur	0.4214	10684	216.18	0.11	63.70	236147475	1162763206
2017	Kab Lombok Timur	0.4854	11261	215.81	3.64	64.37	398088461	1142337196
2018	Kab Lombok Timur	0.4831	11557	196.87	3.02	65.35	261716110	1147731584
2019	Kab Lombok Timur	0.4818	12014	193.56	3.35	66.23	289621500	1189314927
2020	Kab Lombok Timur	0.3831	11565	183.84	4.17	66.30	319083635	1206685449
2016	Kab Sumbawa	0.2857	20139	71.66	3.12	64.89	135182853	830267942
2017	Kab Sumbawa	0.2912	21320	68.69	3.98	65.84	249526156	815888480
2018	Kab Sumbawa	0.2870	22005	63.77	3.29	66.77	143943920	821927598
2019	Kab Sumbawa	0.2857	12014	63.49	3.35	67.60	163793011	853796671
2020	Kab Sumbawa	0.2759	21750	62.88	4.01	67.61	171830139	875497412
2016	Kab Dompu	0.2159	17970	34.31	1.96	65.48	84012461	582218962
2017	Kab Dompu	0.2105	18910	32.85	2.36	66.33	134347581	572061726

2018	Kab Dompu	0.2062	19461	30.74	3.18	66.97	93289124	571071614
2019	Kab Dompu	0.2057	20053	30.81	3.04	67.83	105458910	594561094
2020	Kab Dompu	0.2133	19160	30.97	3.28	67.84	98410233	547996418
2016	Kab Bima	0.2936	15074	72.36	0.91	64.15	110079232	895038270
2017	Kab Bima	0.3037	15848	72.14	1.55	65.01	188203812	879315326
2018	Kab Bima	0.3007	16321	71.65	4.63	65.62	120342973	876388642
2019	Kab Bima	0.2999	16853	71.95	2.79	66.37	135874142	909112358
2020	Kab Bima	0.2835	16112	71.32	2.89	66.30	153601808	926611508
2016	Kab sumbawa Barat	0.1646	178993	22.47	1.04	69.26	57982409	402617985
2017	Kab sumbawa Barat	0.0508	140349	22.33	5.15	70.08	171632855	403831514
2018	Kab sumbawa Barat	0.0699	89405	20.36	3.53	70.71	66810358	400229072
2019	Kab sumbawa Barat	0.0741	86040	20.45	5.29	71.52	72869945	417480922
2020	Kab sumbawa Barat	0.1679	108014	20.20	5.50	71.63	76739054	411948977
2016	Kab Lombok Utara	0.2039	14560	71.02	1.47	62.24	129750830	398209000
2017	Kab Lombok Utara	0.1987	15303	69.24	1.74	63.04	150949370	392932943
2018	Kab Lombok Utara	0.1951	15030	62.86	0.29	63.83	131074969	392932943
2019	Kab Lombok Utara	0.1939	15779	63.84	1.99	64.49	146700754	408751699
2020	Kab Lombok Utara	0.2001	14486	59.86	3.01	64.42	220559598	421275927
2016	Kota Mataram	0.2896	25111	44.81	4.86	77.20	288415927	609016722
2017	Kota Mataram	0.2952	26604	44.53	5.35	77.84	387757434	598318257
2018	Kota Mataram	0.2917	27398	42.60	6.49	78.43	358825822	598318257
2019	Kota Mataram	0.2921	28377	43.19	5.28	79.10	373951422	634376234
2020	Kota Mataram	0.2840	26331	41.80	6.83	78.91	415000000	641141879
2016	Kota Bima	0.1790	15816	15.42	0.43	73.67	30524800	464125442
2017	Kota Bima	0.1705	16533	15.36	3.51	74.36	52465170	455972250
2018	Kota Bima	0.1665	16973	14.84	2.27	75.04	46115437	455972250
2019	Kota Bima	0.1664	17505	14.80	4.06	75.80	50422855	484764635

2020	Kota Bima	0.1798	16317	14.66	4.42	75.81	62007143	489608423
------	-----------	--------	-------	-------	------	-------	----------	-----------



Lampiran II

Indeks Williamson Tahun 2016-2020

KAB/KOTA	PENDUDU K	PDRB	Yi	Pi/PΣ	Yi-y	(Yi-y) ²	(Pi/PΣ)* (Yi-y) ²		IW 2016
Kab Lombok Barat	665132	14722	0.0221	0.1358	-1.5848	2.5117	0.3412	0.5841	0.3395
Kab Lombok Tengah	922088	11772	0.0128	0.1883	-1.5324	2.3481	0.4422	0.6650	0.3865
Kab Lombok Timur	1173781	10684	0.0091	0.2397	-1.4810	2.1932	0.5258	0.7251	0.4214
Kab Sumbawa	445503	20139	0.0452	0.0910	-1.6297	2.6559	0.2417	0.4916	0.2857
Kab Dompu	241888	17970	0.0743	0.0494	-1.6713	2.7932	0.1380	0.3715	0.2159
Kab Bima	473890	15074	0.0318	0.0968	-1.6239	2.6371	0.2552	0.5052	0.2936
Kab Sumbawa Barat	137072	178993	1.3058	0.0280	-1.6927	2.8652	0.0802	0.2832	0.1646
Kab Lombok Utara	214393	14560	0.0679	0.0438	-1.6769	2.8120	0.1231	0.3509	0.2039
Kota Mataram	459314	25111	0.0547	0.0938	-1.6269	2.6467	0.2483	0.4983	0.2896
Kota Bima	163101	15816	0.0970	0.0333	-1.6874	2.8473	0.0948	0.3080	0.1790
Total	4896162		1.7207						

KAB/KOTA	PENDUDU K	PDRB	Yi	Pi/PΣ	Yi-y	(Yi-y) ²	(Pi/PΣ)* (Yi-y) ²		IW 2017
Kab Lombok Barat	675222	15450	0.0229	0.1363	-1.4034	1.9695	0.2684	0.5180	0.3632
Kab Lombok Tengah	930797	12412	0.0133	0.1878	-1.4129	1.9964	0.3750	0.6124	0.4293
Kab Lombok Timur	1183204	11261	0.0095	0.2388	-1.4168	2.0072	0.4792	0.6923	0.4854
Kab Sumbawa	449680	21320	0.0474	0.0907	-1.3789	1.9013	0.1725	0.4154	0.2912

Kab Dompu	245387	18910	0.0771	0.0495	-1.3492	1.8204	0.0901	0.3002	0.2105
Kab Bima	478967	15848	0.0331	0.0967	-1.3932	1.9410	0.1876	0.4331	0.3037
KabSumbawa Barat	140890	140349	0.9962	0.0284	-0.4301	0.1850	0.0053	0.0725	0.0508
KabLombok Utara	216515	15303	0.0707	0.0437	-1.3556	1.8376	0.0803	0.2834	0.1987
Kota Mataram	468509	26604	0.0568	0.0945	-1.3695	1.8755	0.1773	0.4211	0.2952
Kota Bima	166407	16533	0.0994	0.0336	-1.3269	1.7607	0.0591	0.2432	0.1705
Total	4955578		1.4263						

KAB/KOTA	PENDUDU K	PDRB	Yi	Pi/PΣ	Yi-y	(Yi-y) ²	(Pi/PΣ)* (Yi-y) ²		IW 2018
Kab Lombok Barat	685161	15313	0.0223	0.1367	-1.0276	1.0560	0.1443	0.3799	0.3618
Kab Lombok Tengah	939409	12685	0.0135	0.1874	-1.0365	1.0742	0.2013	0.4486	0.4273
Kab Lombok Timur	1192110	11557	0.0097	0.2378	-1.0403	1.0822	0.2573	0.5073	0.4831
Kab Sumbawa	453797	22005	0.0485	0.0905	-1.0015	1.0029	0.0908	0.3013	0.2870
Kab Dompu	248879	19461	0.0782	0.0496	-0.9718	0.9443	0.0469	0.2165	0.2062
Kab Bima	483901	16321	0.0337	0.0965	-1.0162	1.0327	0.0997	0.3157	0.3007
KabSumbawa Barat	144707	89405	0.6178	0.0289	-0.4321	0.1867	0.0054	0.0734	0.0699
KabLombok Utara	218533	15030	0.0688	0.0436	-0.9812	0.9627	0.0420	0.2048	0.1951
Kota Mataram	477476	27398	0.0574	0.0952	-0.9926	0.9852	0.0938	0.3063	0.2917
Kota Bima	169714	16973	0.1000	0.0339	-0.9500	0.9024	0.0305	0.1748	0.1665
Total	5013687		1.0500						

KAB/KOTA	PENDUDU K	PDRB	Yi	Pi/PΣ	Yi-y	(Yi-y) ²	(Pi/PΣ)* (Yi-y) ²		IW 2019
Kab Lombok Barat	694985	15676	0.0226	0.1371	-0.9978	0.9957	0.1365	0.3694	0.3620

Kab Lombok Tengah	947488	13088	0.0138	0.1869	-1.0066	1.0132	0.1893	0.4351	0.4264
Kab Lombok Timur	1200612	12014	0.0100	0.2368	-1.0104	1.0209	0.2417	0.4917	0.4818
Kab Sumbawa	457671	22878	0.0500	0.0903	-0.9704	0.9417	0.0850	0.2915	0.2857
Kab Dompu	252288	20053	0.0795	0.0498	-0.9409	0.8853	0.0440	0.2099	0.2057
Kab Bima	488577	16853	0.0345	0.0964	-0.9859	0.9720	0.0937	0.3060	0.2999
KabSumbawa Barat	148606	86040	0.5790	0.0293	-0.4414	0.1948	0.0057	0.0756	0.0741
KabLombok Utara	220412	15779	0.0716	0.0435	-0.9488	0.9002	0.0391	0.1978	0.1939
Kota Mataram	486715	28377	0.0583	0.0960	-0.9621	0.9256	0.0888	0.2981	0.2921
Kota Bima	173031	17505	0.1012	0.0341	-0.9192	0.8450	0.0288	0.1698	0.1664
Total	5070385		1.0204						

KAB/KOTA	PENDUDU K	PDRB	Yi	Pi/PΣ	Yi-y	(Yi-y)^2	(Pi/PΣ)* (Yi-y)^2		IW 2020
Kab Lombok Barat	704586	14368	0.0204	0.1375	-0.9793	0.9591	0.1318	0.3631	0.3251
Kab Lombok Tengah	955411	12112	0.0127	0.1864	-0.9304	0.8656	0.1613	0.4017	0.3597
Kab Lombok Timur	1208594	11565	0.0096	0.2358	-0.8810	0.7761	0.1830	0.4278	0.3831
Kab Sumbawa	461502	21750	0.0471	0.0900	-1.0267	1.0542	0.0949	0.3081	0.2759
Kab Dompu	255569	19160	0.0750	0.0499	-1.0669	1.1383	0.0568	0.2382	0.2133
Kab Bima	493198	16112	0.0327	0.0962	-1.0206	1.0415	0.1002	0.3166	0.2835
KabSumbawa Barat	152437	108014	0.7086	0.0297	-1.0870	1.1817	0.0351	0.1875	0.1679
KabLombok Utara	222212	14486	0.0652	0.0434	-1.0734	1.1522	0.0500	0.2235	0.2001
Kota Mataram	495681	26331	0.0531	0.0967	-1.0201	1.0406	0.1006	0.3172	0.2840
Kota Bima	176432	16317	0.0925	0.0344	-1.0824	1.1715	0.0403	0.2008	0.1798

Total	5125622		1.1168	
-------	---------	--	--------	--



Lampiran III

Hasil Regresi

Dependent Variable: KETIMPANGAN

Method: Panel Least Squares

Date: 01/13/22 Time: 15:24

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.930421	0.530498	-7.408928	0.0000
LOG(PE)	-0.020160	0.008989	-2.242778	0.0301
LOG(KEMISKINAN)	0.119555	0.020843	5.736019	0.0000
TPT	0.000771	0.002945	0.261814	0.7947
LOG(IPM)	0.577349	0.137474	4.199689	0.0001
LOG(PAD)	-0.024423	0.014799	-1.650294	0.1062
LOG(DAU)	0.095513	0.021888	4.363615	0.0001
R-squared	0.934357	Mean dependent var		0.276558
Adjusted R-squared	0.925197	S.D. dependent var		0.105600
S.E. of regression	0.028882	Akaike info criterion		-4.122044
Sum squared resid	0.035868	Schwarz criterion		-3.854361
Log likelihood	110.0511	Hannan-Quinn criter.		-4.020109
F-statistic	102.0094	Durbin-Watson stat		1.606668
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dependent Variable: KETIMPANGAN

Method: Panel Least Squares

Date: 01/13/22 Time: 15:44

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.121133	4.289191	-0.494530	0.6241
LOG(PE)	0.053146	0.032552	1.632642	0.1118
LOG(KEMISKINAN)	0.173673	0.179472	0.967692	0.3400
TPT	-0.002717	0.003491	-0.778463	0.4417
LOG(IPM)	0.367133	0.617218	0.594819	0.5559
LOG(PAD)	-0.029363	0.020869	-1.406998	0.1685
LOG(DAU)	0.008967	0.183481	0.048872	0.9613

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.957244	Mean dependent var	0.276558
Adjusted R-squared	0.938382	S.D. dependent var	0.105600
S.E. of regression	0.026213	Akaike info criterion	-4.190780
Sum squared resid	0.023362	Schwarz criterion	-3.578933
Log likelihood	120.7695	Hannan-Quinn criter.	-3.957785
F-statistic	50.74796	Durbin-Watson stat	1.997167
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dependent Variable: KETIMPANGAN

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/13/22 Time: 15:27

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 50

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.931599	0.518083	-7.588742	0.0000
LOG(PE)	-0.018889	0.008893	-2.123908	0.0395
LOG(KEMISKINAN)	0.120248	0.020230	5.944193	0.0000
TPT	0.000546	0.002691	0.202986	0.8401
LOG(IPM)	0.575931	0.132503	4.346535	0.0001
LOG(PAD)	-0.024594	0.014166	-1.736173	0.0897
LOG(DAU)	0.095311	0.021858	4.360438	0.0001
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.005618	0.0439
Idiosyncratic random			0.026213	0.9561
Weighted Statistics				
R-squared	0.922707	Mean dependent var		0.249396
Adjusted R-squared	0.911921	S.D. dependent var		0.095771
S.E. of regression	0.028423	Sum squared resid		0.034738
F-statistic	85.55363	Durbin-Watson stat		1.643622
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.934312	Mean dependent var		0.276558
Sum squared resid	0.035893	Durbin-Watson stat		1.590726